

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJ IP) TAHUN 2015



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jalan Urip Sumoharjo No.269 Makassar (90222)

Telp. (0411) 453486 Fax. (0411) 453869

Makassar 2016



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)**

Jl. Urip Sumoharjo No. 269 Telp. 453486 Fax. 453869

MAKASSAR 90231

IKTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan perwujudan hasil pertanggungjawaban Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sulawesi Selatan yang memuat hasil kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2015 kepada Gubernur Sulawesi Selatan. Penyusunan ini, mengacu pada Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang intinya menegaskan bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah mulai pejabat eselon II keatas diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan berdasarkan perencanaan strategis (RENSTRA) yang telah disepakatinya.

Dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini menggambarkan tingkat capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) pada tahun anggaran 2015 yang merupakan tolok ukur tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Pencapaian realisasi penggunaan anggaran yang terbagi dalam 5 (lima) sasaran, 6 program dan 101 kegiatan dan didukung oleh anggaran APBD TA. 2015. Dalam pelaksanaannya pada total belanja daerah yang diperoleh sebesar Rp. 45.982.455.399,- yang terealisasi sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp. 44.676.939.138,- atau sebesar 97,16% dan Realisasi fisik sebesar 99,99 %,

terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 1.305.516,261,-. Belanja daerah ini terdiri atas :

a) Belanja tidak langsung sebesar Rp. 13.986.861.567,- yang terealisasi sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp. 13.863.258.155,- atau sebesar 99,12% dan realisasi fisik sebesar 100,00%, dan

b) Belanja langsung sebesar Rp. 31.995.593.832,- yang terealisasi sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp. 30.813.680.982,- atau sebesar 96,31% dan realisasi fisik sebesar 99,97%.

Adapun tingkat capaian outcome sebesar 100,00 %. Selanjutnya merujuk pada Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diterbitkan oleh Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka skala pengukuran kinerja yang diperoleh oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sulawesi Selatan termasuk dalam kategori "Sangat Baik" hal ini ditunjukkan oleh tingkat capaian kinerja output (input dana) sebesar 97,16% dan tingkat capaian kinerja outcome sebesar 100,00%.



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)**

Jl. Urip Sumoharjo No. 269 Telp. 453486 Fax. 453869

MAKASSAR 90231

SURAT KEPUTUSAN

**KEPALA BAPPEDA PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 188.4 / 1123 / BAPPEDA /TAHUN 2015**

TENTANG

**PENETAPAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJ IP)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BAPPEDA SULAWESI SELATAN,**

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Inpres Nonor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana setiap SKPD diwajibkan membuat LAKIP yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor. 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 235);

10. Peraturan Daerah N0.7 Tahun 2015 tanggal 14 September 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
11. Peraturan Daerah No 9 Tahun 2015 tanggal 23 Nopember 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA TENTANG PENETAPAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJ IP) BAPPEDA PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2016

Pasal 1

Dalam SK Kepala Bappeda ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
2. LAKIP adalah laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan;

Pasal 2

1. LKJ IP Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan merupakan suatu komitmen perencanaan yang disusun untuk dijadikan alat bantu untuk pengukuran capaian kinerja dan merupakan tolok ukur dalam mengembangkan amanah yang ditetapkan dalam RPJMD;
2. LKJ IP Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan merupakan gambaran capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, memuat gambaran hasil-hasil pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2015;

Pasal 3

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 bertujuan untuk mengetahui capaian kinerja yang telah dicapai dan untuk menetapkan terselenggaranya kegiatan-kegiatan prioritas sesuai visi, misi, kebijakan, tujuan, dan sasaran yang ingin dicapai oleh unit kerja Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan yang disesuaikan dengan posisi dan peran yang diemban;

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah berkenan melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ IP) Tahun 2015 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sulawesi Selatan dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ IP) merupakan perwujudan hasil pertanggungjawaban Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sulawesi Selatan yang memuat hasil kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2015 kepada Gubernur Sulawesi Selatan. Penyusunan ini, mengacu pada Perpres Nomor 9 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang intinya menegaskan bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah mulai pejabat eselon II keatas diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan berdasarkan perencanaan strategis (RENSTRA) yang telah disepakatinya.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ IP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sulawesi Selatan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sulawesi Selatan, memuat visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan serta pengukuran pelaksanaan program dan kegiatan yang secara maksimum menggambarkan kinerja outcomenya dan diharapkan akan meningkat pada tahun berikutnya. Disamping itu Penyusunan LKJ IP ini dapat menjadi bahan informasi dan pertimbangan dalam pelaksanaan pembangunan yang akan datang.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ IP) yang telah di susun masih terdapat berbagai kekurangan dan ketidaksempurnaan, untuk itu diperlukan saran dan kritik dari berbagai pihak dalam penyempurnaannya. Sekian dan terima kasih.

Makassar, 2016

PLT. Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan.

Dr.ABDUL HARIS,SH,MM
Pembina Utama Madya
NIP.19591014 198403 1 011

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LatarBelakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan	1
1.3. Landasan Hukun.....	2
1.4. Gambaran Organisasi.....	3
1.5. Pembinaan Staf.....	60
1.6. Lingkungan Strategis	61
1.7. Kebijakan Otonomi Daerah	61
1.8. Kondisi Sosial dan Ekonomi.....	62
1.9. Sistematika Penulisan	62
BAB II PERENCANAAN STRATEJIK	64
2.1. Perencanaan Strategik	64
2.2. Perjanjian Kinerja.....	75
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	76
3.1. Metode Pengukuran Pencapaian Kinerja	76
3.2. Pengukuran/PenetapanCapaianKinerja.....	76
3.3. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja.....	77
3.4. Aspek Keuangan.....	109
BAB IV P E N U T U P	112
LAMPIRAN-LAMPIRAN	115
1. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) berdasarkan Keputusan Kepala LAN RI Nomor : 239/IX/6/8/2003	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ IP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sulawesi Selatan didasarkan atas dokumen Perencanaan Strategis yang telah ditetapkan dan disepakati sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 Tentang petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ IP) merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan berdasarkan perencanaan strategis yang telah dirumuskan oleh masing-masing instansi pemerintah kepada Gubernur yang dilaksanakan selama satu tahun anggaran.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ IP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sulawesi Selatan dimaksudkan untuk memberikan laporan kepada Gubernur Sulawesi Selatan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban selama tahun 2015. Sedangkan tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat capaian kinerja baik out put maupun out come yang dicapai oleh Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2015.

1.3. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ IP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan dengan tetap mengacu pada :

- TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme;
- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pasal 3 dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas;
- Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 16/KEP/M.PAN/3/2001 Tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya, maka rumpun jabatan, kedudukan, tugas pokok dan rincian kegiatan fungsional perencana;
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 132/KEP/M.PAN/12/2002 dan Keputusan Bersama Kepala Perpustakaan Nasional RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2003 dan nomor 21 tahun 2003 Tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya, maka rumpun jabatan, instansi Pembina, kedudukan dan tugas pokok fungsional pustakawan;
- Peraturan Daerah No 9 tahun 2015 tanggal 23 Nopember 2015 perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013 – 2018;

- Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahun 2003 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Akuntabilitas;
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2013 perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan;
- Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
- Revisi Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 2099/IX/Tahun 2015, Tanggal 23 September 2015;
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 11/ X/Tahun 2015 Tanggal 26 Oktober 2015 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015.

1.4. GAMBARAN ORGANISASI

Gambaran organisasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sulawesi Selatan ini memuat tentang kedudukan atau susunan organisasi, tugas pokok, fungsi dan rincian tugas, sumberdaya

aparatur, sumberdaya keuangan, sarana dan prasarana sebagai berikut.

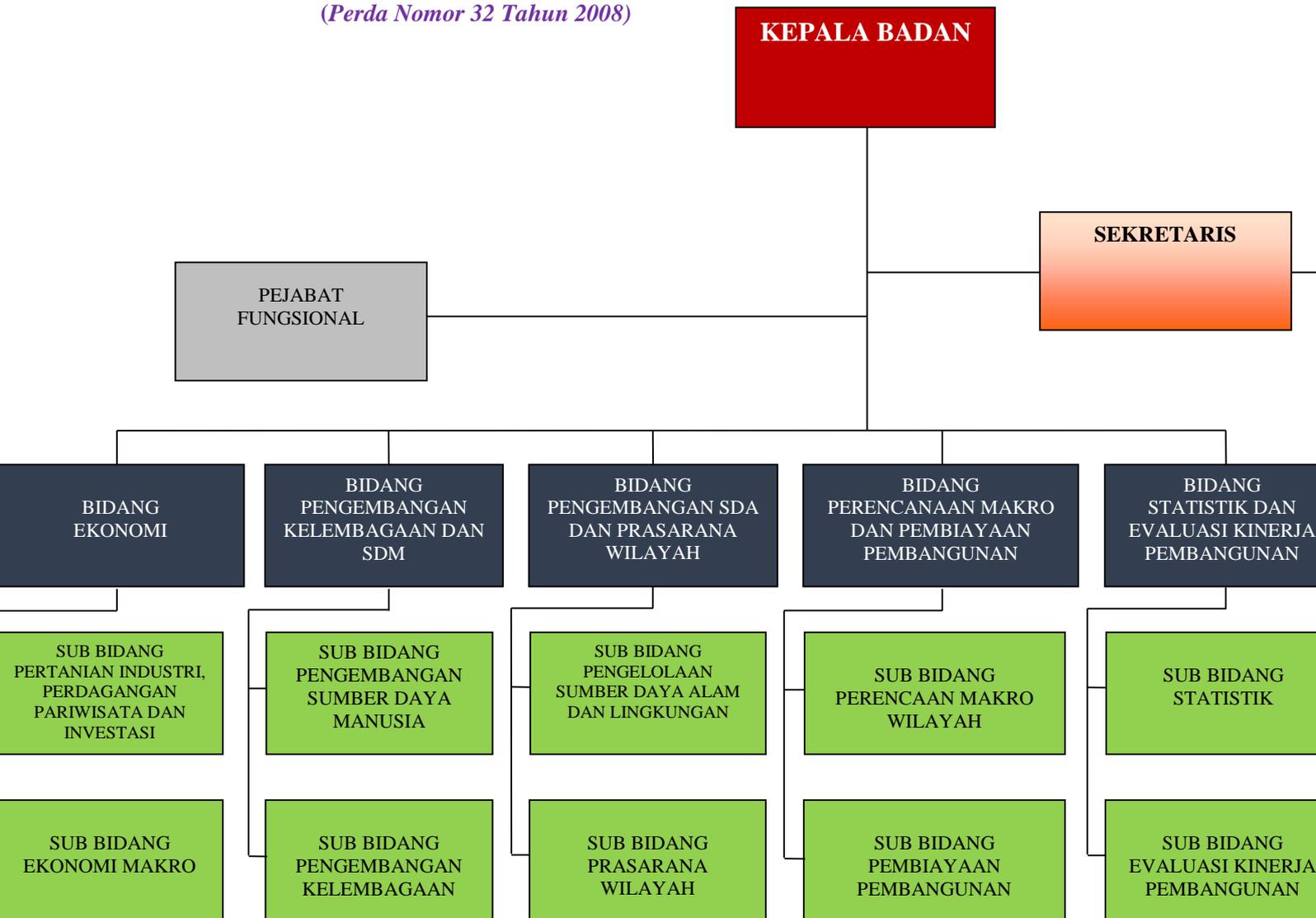
SUSUNAN ORGANISASI

Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sulawesi Selatan ditetapkan sejak Tahun 1982 yang telah mengalami penyempurnaan sejak diberlakukannya otonomi daerah. Susunan organisasi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 26 Juni 2013 sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Keuangan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - c. Sub Bagian Program.
3. Bidang Ekonomi terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pertanian, Industri, Perdagangan, Pariwisata dan Investasi;
 - b. Sub Bidang Ekonomi Makro.
4. Bidang Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia;
 - b. Sub Bidang Pengembangan KelembagBidang Sumber Daya Alam dan Prasarana Wilayah terdiri dari :
 - c. Sub Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan;
 - d. Sub Bidang Prasarana Wilayah.
5. Bidang Statistik dan Evaluasi Kinerja Pembangunan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Statistik;
 - b. Sub Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan.
6. Bidang Percanaan Makro dan Pembiayaan Pembangunan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Perencanaan Makro Wilayah;
 - b. Sub Bidang Pembiayaan Pembangunan.
7. Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN (Perda Nomor 32 Tahun 2008)



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sulawesi Selatan

SUMBER DAYA BAPPEDA PROVINSI SULAWESI SELATAN**1.5 Sumber Daya Manusia**

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan didukung oleh sumber daya aparatur yang terdistribusi menurut bidang dan kesekretariatan. Pada tahun 2015, jumlah pegawai Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebanyak 127 orang Pegawai Negeri sipil yang terdiri dari lihat tabel berikut ini;

Tabel 1. Jumlah Pejabat Struktural Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015

NO	KETERANGAN	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Eselon II	1	-	1
2	Eselon III	5	1	6
3	Eselon IV	8	4	12
	Total	15	4	19

Sumber : Bagian Umum & Kepeg. Bappeda Prov. Sulsel 2015

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan pada jabatan struktural terdapat satu orang laki-laki pejabat eselon II, lima orang laki-laki dan satu orang perempuan yang menempati jabatan eselon III, serta ada 13 jabatan pada eselon IV yang terdiri dari delapan orang laki-laki dan empat orang perempuan.

Tabel 2. Jumlah Pegawai Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Jabatan Fungsional Tahun 2015

NO	KETERANGAN	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Fungsional Perencana Madya	3	13	16
2	Fungsional Perencana Muda	3	4	7
	Total	6	17	23

Sumber : Bagian Umum & Kepeg. Bappeda Prov. Sulsel 2015

Dari tabel tersebut diatas menggambarkan bahwa Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan terdapat 23 orang pejabat Fungsional Perencana dengan rincian pejabat fungsional Perencana Madya terdapat tiga belas orang perempuan dan tiga orang laki-laki, sedangkan pada fungsional Perencana Muda empat orang laki-laki dan tiga orang perempuan.

Tabel 3. Jumlah Pegawai Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan tingkat Golongan Tahun 2015

NO	KETERANGAN	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Golongan IV	17	19	36
2	Golongan III	39	21	60
3	Golongan II	24	6	30
4	Golongan I	1	-	1
	Total	81	46	127

Sumber : Bagian Umum & Kepeg. Bappeda Prov. Sulsel 2015

Dari tabel tersebut tergambar bahwa jumlah pegawai Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2015 terdapat 127 orang pegawai yang terdiri dari 81 orang laki-laki dan 46 orang perempuan dengan rincian pergolongan sebagai berikut; 17 orang laki-laki dan 19 orang perempuan yang bergolongan IV, 39 orang laki-laki dan 21 orang perempuan yang bergolongan III, 24 orang laki-laki dan 6 orang perempuan yang bergolongan II, serta ada 1 orang laki-laki yang bergolongan I.

Tabel 4. Laki-laki dan Perempuan menurut tingkat Pendidikan Staf Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015

NO	KETERANGAN	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	S3	2	1	3
2	S2	22	27	49
3	S1	35	13	48
4	D3/Sarmud	-	3	3
5	SMA/ sederajat	21	2	23
6	SMP/ sederajat	-	-	-
7	SD	1	-	1
	Total	81	46	127

Sumber : Bagian Umum & Kepeg. Bappeda Prov. Sulsel 2015

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa dari 127 orang staff Bappeda provinsi Sulawesi Selatan terdapat 81 orang laki-laki dan 46 orang perempuan dengan kualifikasi pendidikan masing-masing dua orang laki-laki dan satu orang perempuan yang memiliki kualifikasi pendidikan S-3, dua puluh dua orang laki-laki dan dua puluh tujuh orang perempuan yang memiliki kualifikasi pendidikan S-2, tiga puluh lima orang laki-laki dan tiga belas orang perempuan yang memiliki kualifikasi pendidikan S-1, tiga orang perempuan yang berpendidikan Sarjana Muda, dua puluh satu orang laki-laki dan dua orang perempuan orang tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, serta satu orang laki-laki tamatan Sekolah Dasar.

Meskipun tingkat pendidikan pegawai di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sudah cukup tinggi, namun masih perlu senantiasa diberikan penguatan-penguatan khususnya dalam bidang perencanaan dan pengembangan wilayah.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan dapat berjalan dengan baik, selain dukungan sumber daya aparatur yang terampil juga perlu didukung oleh ketersediaan prasarana dan sarana yang memadai untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan secara berkesinambungan, daya dukung sarana penunjang operasional tersebut diantaranya adalah peralatan dan perlengkapan perkantoran.

1.6. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari tugas pokok, fungsi dan rincian tugas jabatan struktural dan tugas pokok, fungsi dan rincian tugas jabatan fungsional. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, maka kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) adalah

melaksanakan tugas pokok yang merupakan ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan yang berfungsi dalam melakukan pekerjaan sebagai penjabaran dari tugas pokok.

Kelompok jabatan fungsional pada kantor BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari fungsional perencana dan fungsional pustakawan. Pejabat fungsional perencana meliputi : a) Pejabat Fungsional Perencana Utama, b) Pejabat Fungsional Perencana Madya, c) Pejabat Fungsional Perencana Muda, dan d) Pejabat Fungsional Perencana Pertama. Pejabat fungsional pustakawan terdiri dari : a) Pejabat Fungsional Pustakawan Tingkat Terampil dan b) Fungsional Pustakawan Tingkat Ahli. Pejabat fungsional pustakawan tingkat terampil terdiri dari : a) pustakawan pelaksana, b) pustakawan pelaksana lanjutan, dan c) pustakawan penyelia. Sedangkan jabatan fungsional pustakawan tingkat ahli terdiri dari : a) pustakawan pertaman, b) pustakawan muda, c) pustakawan madya, c) pustakawan utama.

1.7 LINGKUNGAN STRATEGIS

Lingkungan Internal

Melalui pencermatan (scanning) terhadap lingkungan internal menghasilkan penemukenalan atas sejumlah potensi kekuatan (potential internal strengths) dan potensi kelemahan (potential internal weaknesses). Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat diidentifikasi beberapa faktor kekuatan dan kelemahan internal yang sangat mempengaruhi keberhasilan BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan dalam mencapai Visi dan Misi yang telah disepakati.

Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal merupakan cerminan peluang, tantangan atau ancaman yang dihadapi oleh Organisasi BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.

1. 8. KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH

Salah satu kebijakan nasional yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan di masa mendatang adalah penerapan otonomi daerah yang secara signifikan mengurangi kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Konsekuensi dari berkurangnya kewenangan provinsi adalah masing-masing kabupaten/kota cenderung mementingkan daerah sendiri yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antar kabupaten/kota, bahkan dengan provinsi. Dengan demikian, BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan ditantang untuk dapat mengantisipasi timbulnya konflik tersebut melalui upaya revitalisasi dan reposisi tugas dan fungsi BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan sesuai tuntutan otonomi yang ada sekarang ini. Namun pada sisi lain, dengan adanya Undang-undang dan peraturan tersebut, maka program-program pembangunan daerah yang direncanakan dapat lebih terfokus sesuai tugas dan fungsi dan kewenangan Pemerintah Provinsi di dalam era otonomi ini.

1. 9. KONDISI SOSIAL DAN EKONOMI

Kondisi ekonomi dan politik masyarakat dalam menyikapi dan memaknai perencanaan pembangunan masih sangat terasa dampaknya yang semakin berkembang dan meluasnya berbagai permasalahan ekonomi, politik antara lain kemiskinan, penyimpangan perilaku dan tindak kekerasan yang kesemuanya itu merupakan tantangan utama pembangunan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan dituntut untuk lebih pro aktif menyikapi berhasilnya pelaksanaan pembangunan, tergantung daripada peran aktif, sikap, mental tekad, semangat dan disiplin serta ketaatan terhadap peraturan perundangan yang berlaku dari semua pihak baik pemerintah, lembaga eksekutif, lembaga Legislatif, lembaga peradilan, dunia usaha serta masyarakat luas. Sehingga untuk mewujudkan terciptanya visi dan

misi pembangunan daerah dalam memenuhi tuntutan perubahan secara nyata dan profesional dapat tercapai.

Beberapa isu yang sering ditemukan dalam proses Perencanaan Pembangunan Daerah antara lain;

1. Analisis kondisi wilayah merupakan hal utama dan penting dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah, analisis kondisi wilayah perencanaan membutuhkan data dan informasi yang aktual, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan ketersediaan data dan informasi yang akurat akan sangat menentukan langkah selanjutnya keberhasilan perencanaan.
2. Salah satu variabel penentu keberhasilan suatu rencana banyak ditentukan ketersediaan dan kualitas para perencana, sebagai pelaksana perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk senantiasa meningkatkan kualitas kinerja dan profesionalisme.
3. Bappeda adalah lembaga perencana yang menempatkan posisinya sebagai perekat perencanaan dalam wilayah, salah satu hal yang sulit dilaksanakan adalah membangun sinergitas antar Kabupaten/Kota dan antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota.
4. Tingkat Kualitas suatu rencana dapat dicapai jika dilengkapi dengan berbagai peralatan perencanaan yang terkait dengan analisis terhadap indikator sosial, ekonomi dan indikator lainnya yang sering digunakan sebagai ukuran keberhasilan beberapa aturan perundang-undangan terkait perencanaan yang belum maksimal diterapkan.
5. Proses perencanaan pembangunan daerah sampai dengan pelaksanaannya perlu dilakukan Evaluasi sebagai pengendalian terhadap jalannya pelaksanaan pembangunan apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Jika ditemukan target dan sasaran yang tidak tercapai, maka akan menjadi masukan perbaikan untuk perencanaan yang akan datang.

Adapun permasalahan yang dihadapi Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir ini adalah;

1. Belum konsistennya antara dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan.
2. Belum akuratnya data dan informasi dokumen perencanaan baik antar Kabupaten/Kota dan antar Provinsi dengan Kabupaten/Kota.
3. Belum optimalnya hasil analisa perencanaan pembangunan untuk perumusan kebijakan.
4. Dan belum optimalnya pengelolaan dokumen perencanaan, pembinaan dan pelayanan administrasi umum.

1.10. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI BAPPEDA PROVINSI SULAWESI SELATAN

Selama periode 2008-2013, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya telah diupayakan secara optimal. Namun demikian, upaya tersebut masih menyisakan beberapa persoalan yang belum sepenuhnya sesuai dengan harapan, antara lain belum sepenuhnya selaras antara rencana pembangunan dengan pelaksanaannya baik pusat maupun daerah. Kemudian terkait dengan munculnya berbagai masalah baru dan mendesak, seperti penanganan bencana alam, penanggulangan kemiskinan, penanganan terhadap dampak pemanasan global, new inisiatif pemerintah dan antisipasi terhadap fluktuasi harga bahan bakar minyak. Berkaitan dengan isu-isu tersebut, maka Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan dituntut untuk antisipatif dan proaktif dalam mengkaji berbagai strategi dan menyelesaikan berbagai Permasalahan Pembangunan tersebut, sehingga pencapaian tujuan pembangunan daerah tetap terjamin.

Dalam pelaksanaan peran Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan sebagai lembaga di bidang perencanaan daerah, dipandang perlu peningkatan sumberdaya manusia secara solid dan terintegrasi untuk menghasilkan kualitas hasil analisis, telaahan, dan kajian-kajian kebijakan pembangunan yang

melahirkan dokumen perencanaan perumusan kebijakan pembangunan daerah dan nasional yang tepat, terarah dan dapat dilaksanakan. Peningkatan kualitas hasil analisis/telaahan/kajian sangat penting dilakukan karena untuk meningkatkan ragam, kualitas dan pemanfaatan data/informasi yang optimal. Selain itu, dilakukan upaya perbaikan secara berkelanjutan untuk mencapai keselarasan antara perencanaan dan penganggaran, yang ditunjukkan dengan semakin mendekatnya antara pencapaian sasaran dalam dokumen perencanaan dengan ketersediaan penganggaran. Namun demikian, keselarasan tersebut masih belum sepenuhnya sesuai harapan karena terbatasnya instrumen perencanaan pengendalian dan pengawasan pembangunan, serta belum optimalnya mekanisme *reward and punishment*. Masih terdapat ketidakselarasan antara rencana pembangunan, penganggaran dan pelaksanaan yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Berdasarkan kondisi tersebut, kapasitas Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah perlu diperkuat agar dapat memastikan berjalannya proses perencanaan pembangunan secara baik. Antara lain dengan mengawal dan memperkuat sistem manajemen ketidaksesuaian (*inconsistency*) antara rencana pembangunan dan implementasinya, yang dapat menyebabkan terhambatnya pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Tabel Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan

PENGAMBIL KEPUTUSAN (POLICY/DECISION MAKER)	TINHK TANK	KOORDINATOR	ADMINISTRATOR
<p>Perencanaan:</p> <p>1. Konsistensi dokumen penganggaran terhadap dokumen perencanaan masih diperlukan mekanisme instrument yang mengatur secara lebih tegas.</p> <p>Penganggaran:</p> <p>1. Perubahan Poldas menjadi RPJP (UU 22/1999 menjadi UU 25/2044 dan UU 17/2007).</p> <p>2. Pedoman baru permendagri 54/2010, mencakup:</p> <p>a. perubahan struktur dokumen, tata cara penyusunan, penetapan dan pengendalian/evaluasi.</p> <p>b. Fungsi konsultatif terhadap RPJMD kabupaten/kota.</p> <p>Pengendalian, Pelaksanaan dan Evaluasi:</p> <p>1. Evaluasi RAPBD kabupaten/kota.</p> <p>2. Evaluasi Dokumen Perencanaan Kabupaten/Kota (RPJP, RPJMD, RKPD, dll).</p> <p>3. Evaluasi dokumen perencanaan SKPD (RENSTRA, RENJA, dll).</p> <p>4. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan (monitoring dan evaluasi).</p>	<p>1. Ketersediaan dan akurasi data/informasi.</p> <p>2. Penanggulangan kemiskinan.</p> <p>3. Sinkronisasi program pusat-daerah dan capaian target-target nasional.</p> <p>4. Penataan ruang wilayah dan kawasan strategis.</p> <p>5. Perencanaan dan evaluasi penataan ruang wilayah provinsi/kabupaten/kota.</p>	<p>1. Implementasi kesepakatan kerjasama terutama dengan swasta dan pemerintah.</p> <p>2. Komitmen kepala daerah kabupaten/kota terhadap kerjasama pembangunan.</p> <p>3. Koordinasi, KEK, RAD-GRK RAD-Pangan dan Gizi, MP3EI, MP3KI,.</p>	<p>1. Koordinasi Integrasi, sinkronisasi perencanaan/evaluasi.</p> <p>2. Konsistensi pelaksanaan kegiatan dan Rasionalisasi pelaksanaan fisik/keuangan.</p> <p>3. Koordinasi kerangka regulasi dan fungsi Bappeda kabupaten/kota (dokumen perencanaan) serta Dukungan pendanaan Bappeda kabupaten/kota..</p> <p>4. Reformasi birokrasi.</p> <p>5. Optimalisasi Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana perkantoran serta penyediaan barang dan jasa perkantoran.</p>

1. 11. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang
1. 2. Maksud dan Tujuan
1. 3. Landasan Hukum
1. 4. Gambaran Organisasi
1. 5. Sumber daya Manusia
1. 6. Tugas Pokok dan Rincian tugas
1. 7. Lingkungan Strategis
1. 8. Kebijakan Otonomi Daerah
1. 9. Kondisi Sosial dan Ekonomi
1. 10. Identifikasi Permasalahan
1. 11. Sisimatika Penulisan

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2. 1. Perencanaan Strategik
2. 2. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEDA PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 1.1. Metode PENGUKURAN Pencapaian Kinerja
- 1.2. Pengukuran Penetapan capaian Kinerja
- 1.3. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja
- 1.4. Aspek Keuangan

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2. 1. PERENCANAAN STRATEGIK

Menyikapi berbagai dinamika perkembangan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal di Sulawesi Selatan bertekad menjadi wilayah terkemuka di Indonesia melalui pendekatan kemandirian local yang bernafaskan keagamaan pada tahun 2028, olehnya itu semua tatanan yang ada perlu menyikapi secara cermat dan bijaksana.

Untuk mewujudkan maksud yang tertuang tersebut, maka tatanan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bertekad mewujudkannya yang dapat dibuktikan melalui pernyataan Visi yakni “Sulawesi Selatan Sebagai Provinsi Sepuluh Terbaik Dalam Pelayanan Hak Dasar” dan telah dituangkan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 – 2018 (Peraturan Daerah No 9 Tahun 2015 perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013). Untuk mewujudkan hal tersebut diatas maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sulawesi Selatan dalam pelaksanaan perencanaannya menetapkan hal-hal berikut :

2. 1. 1. Penetapan Visi dan Misi

Rumusan Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sulawesi Selatan mengacu pada visi dan misi Provinsi Sulawesi Selatan dengan focus pada Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

2. 1. 2. Pernyataan Visi

Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sulawesi Selatan adalah “*Profesional Terpercaya dan kompetitif dalam Perencanaan Pembangunan Wilayah*”. Profesional dan terpercaya merupakan tantangan dan kebutuhan perencanaan yang diharapkan pada tahun 2013-2018 dengan menerapkan tatakelola pemerintahan yang baik (good governance). Profesional dan terpercaya diarahkan untuk bagaimana membangun kompetensi dan kapasitas belajar individu yang didasarkan pada etika dan moral yang tinggi sehingga melahirkan berbagai produk perencanaan yang berkualitas. Dengan mengedepankan profesionalisme dalam proses lahirnya produk perencanaan diharapkan strategi dan kebijakan pembangunan dapat menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan yang ada.

2. 1. 3. Pernyataan Misi

Untuk mewujudkan Visi BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan tersebut di atas maka disusun Misi sebagai berikut :

- Mengembangkan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi perencanaan pembangunan yang menjamin sinergi antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat;
- Mengevaluasi kinerja pembangunan Pemerintah Provinsi dan Pembangunan Wilayah;
- Mengembangkan dan meningkatkan sarana prasarana organisasi;
- Mengembangkan kualitas SDM perencana.

2. 1. 4. Nilai-nilai

Nilai adalah prinsip-prinsip yang dianut dan diamalkan bersama di dalam organisasi dalam melaksanakan misi dan merealisasikan visi. Adapun nilai yang dapat berfungsi sebagai landasan dan norma perilaku dari semua komponen yang bertugas melaksanakan misi dan merealisasikan visi BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

- Team Work* : Dapat melaksanakan kegiatan Perencanaan Pembangunan secara terstruktur (Tim) dibawah koordinasi Pimpinan
- Konsistensi* : BAPPEDA harus konsistensi dalam hal kebijakan dan pengambilan keputusan agar menjadikan BAPPEDA sebagai pusat layanan Informasi dan mitra perencanaan untuk pembangunan wilayah.
- Accountable* : Dapat mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.
- Transparansi* : BAPPEDA selalu terbuka terhadap para stakeholder, baik pengguna maupun mitra perencana, para Pemimpin dan staf/pegawai akan selalu terbuka satu sama lain demi terciptanya lingkungan kerja yang produktif dan harmonis.

2. 1. 5. Faktor Kunci Keberhasilan

Faktor-faktor kunci keberhasilan (critical success factors) Adalah unsur-unsur dari suatu organisasi yang menentukan keberhasilan atau kegagalan strategi organisasi. Dengan menggunakan cara skema urutan prioritas (priority ranking scheme), maka dapat ditentukan faktor-faktor kunci keberhasilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sulawesi Selatan sebagaiberikut :

- Terwujudnya perencanaan pembangunan ekonomi wilayah dan pemerintah yang matang dengan pendekatan partisipatif dan berbasis masyarakat.
- Adanya informasi perencanaan bidang sosial yang dijadikan acuan dalam menyusun perencanaan pembangunan Sulawesi Selatan.
- Terdepan dalam perencanaan pembangunan sumber daya alam dan prasarana wilayah.
- Tersusunnya makro wilayah dan mengoptimalkan keterpaduan perencanaan lintas sektor, wilayah serta antar pemerintah, swasta dan masyarakat.

- Tersedianya data yang akurat, informatif dan aktual yang dapat di akses setiap saat.

2. 1. 6. Proyeksi Tahun 2013 – 2018

Proyeksi keberhasilan yang dapat diperkirakan adalah bahwa semua stakeholder menjadikan BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan sebagai organisasi perencanaan pembangunan wilayah yang datanya akurat, tepat waktu dan dapat diandalkan dalam mengambil keputusan pembangunan wilayah.

2. 1. 7. Asumsi

Sebagai upaya pencapaian proyeksi tersebut diatas, maka dapat dicapai dengan asumsi bahwa :

- Semakin memahami pentingnya tugas perencanaan pembangunan wilayah;
- Adanya Team Work yang semakin solid dan makin memahami peran masing-masing;
- Berusaha untuk mengoptimalkan waktu kerja dan selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik.

2. 1. 8. Penetapan Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan Visi dan Misi yang telah dirumuskan serta mempertimbangkan nilai-nilai dan faktor-faktor kunci keberhasilan maka ditetapkanlah tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Secara umum tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah terwujudnya perencanaan pembangunan yang paripurna dan terciptanya sinergitas pembangunan Sulawesi Selatan yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Sedangkan secara khusus tujuan yang diharapkan sebagai berikut :

- Meningkatkan pelayanan perencanaan yang efisien dan efektif guna mendukung terciptanya perencanaan yang profesional dan terpercaya;
- Membangun sinergitas melalui mekanisme perencanaan dari bawah ke atas(topdown) dan dari bawah ke atas(bottom-up);

- Melakukan analisis kondisi dan permasalahan berdasarkan data dan informasi untuk kepentingan perencanaan pembangunan;
- Pengembangan dan penguasaan sistem informasi dan teknologi;
- Membangun kerjasama intern organisasi kerjasama lintas sektor dan lintas wilayah;
- Melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang lebih intensif.
- Membangun stabilitas dengan menerapkan fungsi alokasi anggaran dengan mempertimbangkan pemerataan Wilayah

Adapun sasaran yang diinginkan dalam upaya mewujudkan tujuan sebagai berikut :

- Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas;
- Perencanaan pembangunan yang implementatif;
- Pemanfaatan dokumen rencana pembangunan daerah yang akuntabel;
- Konsistensi antara program kegiatan yang dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya;
- Pemanfaatan peralatan perkantoran yang berbasis IT;
- Data dan informasi pembangunan yang aktual dan Valid;
- Meningkatkan profesionalisme aparatur perencanaan;
- Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappeda Prov. Sulsel.

2. 1. 9. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah pemikiran-pemikiran secara konseptual, analitis, rasional, realistis dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar atau mempercepat pencapaian visi yang telah ditetapkan. Rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi untuk merealisasikannya meliputi kebijakan, program, dan kegiatan.

2. 1. 10. Kebijakan

Penetapan kebijaksanaan sebagai suatu cara untuk mencapai tujuan dan sasaran, dalam kaitannya dengan Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan, maka kebijaksanaan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

- Menemukanali dan mengembangkan potensi ekonomi wilayah.
- Mengembangkan determinan dan indikator peningkatan kualitas SDM dan Kesejahteraan sosial.
- Mengembangkan system pengelolaan SDA yang berkelanjutan dan prasarana wilayah.
- Membangun system data dan informasi yang bersinergi antar Bappeda dengan lembaga pemerintah lainnya dan lembaga non pemerintah.
- Meningkatkan kapasitas dan keseimbangan kerjasama perencanaan pembangunan antara lembaga pemerintah dan non pemerintah.
- Memberdayakan system kelembagaan Bappeda dalam mendukung perencanaan pembangunan.

Untuk mewujudkan kebijaksanaan yang ditetapkan, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan dalam wujud Program dan Kegiatan. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2015 sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik;
- c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
- e. Penyediaan Jasa perbaikan Peralatan Kerja;
- f. Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)
- g. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
- h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor;

- i. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- j. Penyediaan jasa Administrasi keuangan;
- k. Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor;
- l. Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional;
- m. Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor;
- n. Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor;
- o. Pemeliharaan rutin berkala mebeleur;
- p. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya;
- q. Pengadaan pakaian kerja lapangan;
- r. Pendidikan dan pelatihan Formal
- s. Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu;
- t. Penyusunan Laporan dan Pengelolaan administrasi perkantoran;
- u. Pengelolaan perpustakaan, pengarsipan, dokumentasi dan informasi;
- v. Penyusunan pengelolaan barang dan jasa Bappeda Prov. Sulsel;
- w. Pemeliharaan sistem Manajemen Akuntansi dan keuangan Daerah;
- x. Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan;
- y. Penyusunan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- z. Pemberian penghargaan purna tugas;

2. Program Peningkatan Kapasitas dan kinerja SKPD

Kegiatan :

- a. Penyusunan rencana Kerja tahunan
- b. Penyusunan DPPA SKPD
- c. Pentusunan RKA dan DPA SKPD
- d. Penyusunan Laporan kegiatan SKPD;
- e. Penyusunan pelaporan keuangan Semesteran;
- f. Penyusunan pelaporan Prognosis realisasi anggaran;
- g. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun;
- h. Penyusunan Laporan Administrasi Keuangan;
- i. Peningkatan kemampuan tekhnis aparat perencana;
- j. Penyusunan analisis kebutuhan pendataan dan pengadaan barang dan jasa SKPD;

- k. Peningkatan kinerja aparatur perencanaan Bappeda Prov.Sulsel;

3. Peningkatan Pengembangan sistem Perencanaan dan sistem Evaluasi kinerja SKPD

Kegiatan :

- a. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Prov.Sulsel;
- b. Penyusunan bahan LKPJ Gubernur;
- c. Pengukuran Kinerja pembangunan Prop.Sulsel 2014

4. Program Pengembangan data dan Informasi

Kegiatan :

- a. Penyusunan data dan Informasi Bappeda Prop,Sulsel;
- b. Pengelolaan data dan Informasi Spasial pembangunan;
- c. Penyusunan pengumpulan dan analisis data informasi kebutuhan perencanaan bidang sosial budaya dan pengembangan kelembagaan;
- d. Pembangunan data dan informasi spasial pembangunan Sulawesi Selatan
- e. Publikasi data dan Informasi Pembangunan daerah;
- f. Pengumpulan,Updating dan analisis serta Informasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan;
- g. Pameran pembangunan Daerah;

5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;

Kegiatan :

- a. Workshop Hasil-hasil kajian Bappeda Tahun Anggaran 2014;
- b. Sinkronisasi dan sinergitas kegiatan perencanaan Pembangunan Daerah prop.Sulsel;
- c. Koordinasi perencanaan Program kebijakanPembangunan Sulsel;
- d. Penyusunan dan analisis sektor dalam PDRB Sulawesi selatan;
- e. Pengembangan kerjasama pembangunan terkait pengembangan SDA dan Prasarana wilayah;

- f. Koordinasi perencanaan pelaksanaan dan pengelolaan jaringan irigasi melalui WISMP;
- g. Koordinasi perencanaan pengembangan kawasan prioritas cepat tumbuh dan andalan;
- h. Koordinasi Perencanaan pengembangan perumahan dan pemukiman;
- i. Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infra struktur wilayah;
- j. Koordinasi perencanaan pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan Lingkungan hidup dan SDA;
- k. Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pengembangan kawasan sehat;
- l. Fasilitasi kerjasama dengan swasta lembaga terkait pengembangan SDA dan Prasarana wilayah;
- m. Pengembangan program kerjasama bidang Sosbud dan pengembangan kelembagaan;
- n. Koordinasi kebijakan program prioritas pembangunan pendidikan pemuda dan Olahraga
- o. Koordinasi kebijakan program prioritas pembangunan kesehatan dan kesejahteraan Sosial;
- p. Koordinasi kebijakan program prioritas pembangunan kelembagaan pemerintah dan Masyarakat;
- q. Koordinasi kebijakan Program prioritas pembangunan Kependudukan dan tenaga kerja;
- r. Koordinasi Program Indeks Demokrasi Indonesia (IDI);
- s. Koordinasi Percepatan pencapaian tujuan pembangunan Milineum (MDGs);
- t. Updating rencana Aksi Daerah pemberantasan Korupsi Prop,Sulsel;
- u. Updating rencana aksi daerah pangan dan Gizi (RAD-PG);
- v. Kerjasama pembangunan Antar Daerah Bidang Ekonomi;
- w. Koordinasi kerjasama pembangunan antara daerah bidang Ekonomi;
- x. Koordinasi pengembangan UKM dan Wira usaha di Sulsel;
- y. Perencanaan Pembangunan bidang Ekonomi;
- z. Koordinasi perencanaan Industri di Sulsel;
- aa. Koordinasi Perencanaan ketahanan pangan di Daerah;

- bb. Koordinasi pengembangan pemasaran Produksi unggulan Daerah;
- cc. Koordinasi Perencanaan pengentasan kemiskinan di Sulsel;
- dd. Perencanaan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus;
- ee. Penyusunan penetapan Kinerja (PK) SKPD Pemerintah Prov.Sulsel tahun 2015
- ff. Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi bidang penguatan Akuntabilitas Kinerja;
- gg. Penyusunan Laporan dana alokasi khusus NON DR Tahun 2015;
- hh. Penyusunan dan sosialisasi Daftar alokasi kegiatan APBN dan APBD Prov.Sulsel Tahun 2015;
- ii. Evaluasi RKPD Prov.Sulsel;
- jj. Penyusunan Usulan Pendanaan dan Konsultasi Program kegiatan Dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- kk. Forum kerjasama pembangunan Regional;
- ll. Penyusunan Rancangan RKPD;
- mm. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD;
- nn. Penetapan RKPD;
- oo. Penyusunan KUA dan PPAS APBD Pokok;
- pp. Analisis Kebijakan perencanaan Keuangan Daerah
- qq. Analisis Kebijakan perencanaan kebijakan pembangunan Daerah;
- rr. Asistensi Usulan penganggaran Pembangunan;
- ss. Sinergitas perencanaan penganggaran dan kebijakan Pembangunan;
- tt. Penyelenggaraan Rakor Propinsi;
- uu. Penyusunan KUA dan PPAS APBD Perubahan;
- vv. Penyusunan Perubahan RKPD;
- ww. Sosialisasi Kebijakan PerencanaanPembangunan Daerah;

6. Program Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan Daerah;*Kegiatan :*

- a. Evaluasi RPJMD Prov.Sulsel
- b. Monitoring dan pelaporan Program dan kegiatan pembangunan Sulawesi Selatan;
- c. Evaluasi Kinerja Program kegiatan SKPD Propinsi Sulsel 2014;

- d. Sinkronisasi Program – Program Pembangunan
- e. Perubahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
- f. Revisi Renstra Bappeda Prop.Sulsel Tahun 2013-2018;

2. 2. PERJANJIAN KINERJA

Sebagai upaya penyempurnaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ IP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran, maka beberapa hal yang dianggap penting adalah : a) penetapan indikator kegiatan dan indikator sasaran berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 239/IX/6/8/2003 Tanggal 25 Maret 2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan b) perjanjian kinerja yang merupakan suatu bentuk pernyataan penetapan kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 20 Nopember 2014 pengganti permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tanggal 31 Desember 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian kinerja ini merupakan dokumen penetapankinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh suatu instansi. Dalam dokumen perjanjian kinerja ini juga memuat a) sasaran strategis, b) Indikator kinerja utama organisasi, dan c) target kinerja dan anggaran masing-masing program.

Perjanjian kinerja, dan rencana kinerja tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015 yang disesuaikan dengan DPA-SKPD APBD TA. 2015 dapat diuraikan pada tabel II.1 sebagai berikut :

Tabel II. 1 Perjanjian Kinerja Bappeda provinsi Sulawesi Selatan
Tahun Anggaran 2015Perjanjian Kinerja
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun Anggaran 2015

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas	Persentase program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD	97%
2	Perencanaan yang Implementatif	Prosentase rencana kegiatan dalam RenjaSKPD yang terlaksana melalui DPA SKPD	97%
3	Pemanfaatan dokumen rencana pembangunan daerah yang Akuntabel	Komponen keterwakilan Masyarakat dalam forum erencanaan partisipatif/Musrenbang	8 komponen
		Prosentase kesesuaian perencanaan daerah yang sinkron dengan perencanaan pusat,Provinsi dan Kab/Kota	97%
4	Konsistensi antar program kegiatan yang telah dilaksanakan dengan rencana yang telah di susun sebelumnya	Prosentase hasil monitoring dan evaluasi Program yang sesuai dengan target dalam dokumen perencanaan	97%
5	Pemanfaatan peralatan perkantoran berbasis IT	Prosentase pemenuhan peralatan perkantoran berbasis IT	97%
6	Data Informasi Pembangunan yang Aktual dan Valid	Data Statistik tersaji tepat waktu Informasi Pembangunan daerah Sulsel Indikator Pembangunan Ekonomi Sulsel Indikator Pembangunan Sosial Sulsel Profil pembangunan daerah Sulsel Sulsel dalam Angka	Sept Sept Okt Okt Okt
7	Meningkatkan profesionalisme Aparatur Perencana	Prosentase Aparatur Perencana yang ikut diklat bersertifikasi	85%
8	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Bappeda Prov.Sulsel	Predikat Penilaian Implementasi SAKIP SKPD oleh Inspektorat Prov.Sulsel	B

2. 3. ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN STRATEGIS

Anggaran belanja langsung tahun 2015 Bappeda Prov. Sulsel yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel II. 2 Alokasi Anggaran Belanja langsung Per Sasaran Strategis Bappeda Provinsi Sulsel Tahun 2015

NO	SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN	PERSENTASE
1	2	3	4
1	Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas	Rp.125.000.000	84.42 %
2	Perencanaan yang Implementatif	Rp 109.500.000	72.07 %
3	Pemanfaatan dokumen rencana pembangunan daerah yang Akuntabel	Rp 521.190.350	89.98 %
4	Konsistensi antar program kegiatan yang telah dilaksanakan dengan rencana yang telah di susun sebelumnya	Rp 793.872.321	91.75 %
5	Pemanfaatan peralatan perkantoran berbasis IT	Rp 835.621.800	98.46 %
6	Data Informasi Pembangunan yang Aktual dan Valid	Rp 440.000.000	96.58%
7	Meningkatkan profesionalisme Aparatur Perencana	Rp 663.350.000	90.61%
8	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Bappeda Prov.Sulsel	Rp...181.300.000	99.99 %
9	Program pendukung	Rp 2.032.852.821	93.45 %
	Jumlah	Rp 5.702.687.292	90.81%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan wujud nyata Instansi Pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan kepada pemberi mandat atas pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam suatu media pelaporan berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 didasarkan kepada pengukuran dan evaluasi pelaksanaan atas Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2015 yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk menilai sejauh mana perjanjian kinerja telah terlaksana maka dilakukan pengukuran kinerja secara objektif.

Pengukuran Kinerja merupakan metoda Performance Gap, yang dilaksanakan dengan membandingkan antara rencana kerja dengan capaian masing-masing indikator kinerja kegiatan, meliputi input, output dan outcome yang dilakukan melalui suatu proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai tingkat keberhasilan maupun kegagalan suatu program dan kegiatan.

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama

Sebagai implementasi dari Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3986 Tahun 2015 telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Penetapan IKU dimaksudkan sebagai acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menetapkan rencana kerja tahunan, menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 – 2018.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2015 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3-1

Capaian Indikator Kinerja Utama Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI (%)	CAPAIAN KINERJA (%)
1	Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas	Persentase program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD	97	98.02%	101.05
2	Pemanfaatan dokumen rencana pembangunan daerah yang akuntabel	Komponen keterwakilan masyarakat dalam forum perencanaan partisipatif/ musrembang	8	8	100
3	<i>Data dan informasi pembangunan yang aktual dan Valid</i>	<i>Data statistik tersaji tepat waktu</i> <i>a. Informasi pembangunan daerah Sulsel</i> <i>b. Indikator pembangunan ekonomi Sulsel</i> <i>c. Indikator pembangunan sosial Sulsel</i> <i>d. Profil pembangunan daerah</i> <i>e. Sulsel dalam angka</i>	100 Sept Sept Sept Okt Okt	80 Sept Sept Okt Okt Okt	80

III.1 Capaian Kinerja Tahun 2015

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja BAPPEDA

Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2015 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti dijelaskan pada tabel 3-2.berikut:

Tabel 3.2 Skala Nilai Peringkat Kinerja			
No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	90 100	Sangat Tinggi	Hijau Tua
2	76 90	Tinggi	Hijau Muda
3	66 75	Sedang	Kuning Tua
4	51 65	Rendah	Kuning Muda
5	50	Sangat Rendah	Merah

Sumber : Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator Kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan beserta target dan realisasinya dirinci dalam tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Bappeda Provinsi Sulsel Tahun 2015

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	KODE
1	Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas	Persentase program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD	%	97	100%	103.10%	Sangat Baik
2	Perencanaan pembangunan yang implementatif	Persentase rencana kegiatan dalam Renja yang terlaksana melalui DPA SKPD	%	97	99.01%	102.07%	Sangat baik
3	Pemanfaatan dokumen rencana pembangunan daerah yang akuntabel	a. Komponen keterwakilan masyarakat dalam forum perencanaan partisipatif/ musrembang	Komponen	8	8	100%	Sangat Baik
		b. Persentase kesesuaian perencanaan daerah yang sinkron dengan perencanaan pusat, provinsi dan kab/Kota	%	97	99.64%	102.7%	Sangat Baik
4	Konsistensi antara program kegiatan yang dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya	Persentase hasil monitoring dan evaluasi program yang sesuai dengan target dalam dokumen perencanaan	%	97	91.75%	94.59%	Baik
5	Pemanfaatan peralatan perkantoran yang berbasis IT	Persentase pemenuhan peralatan perkantoran yang berbasis IT	%	97	63.38%	65.34%	Sedang

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	KODE
6	<i>Data dan informasi pembangunan yang aktual dan Valid</i>	<i>Data statistik tersaji tepat waktu</i> <i>f. Informasi pembangunan daerah Sulsel</i> <i>g. Indikator pembangunan ekonomi Sulsel</i> <i>h. Indikator pembangunan sosial Sulsel</i> <i>i. Profil pembangunan daerah Sulsel dalam angka</i>	<i>Bulan</i> <i>Bulan</i> <i>Bulan</i> <i>Bulan</i> <i>Bulan</i>	<i>Sept</i> <i>Sept</i> <i>Sept</i> <i>Oktober</i> <i>Oktober</i>	<i>Sept</i> <i>Sept</i> <i>Oktober</i> <i>Oktober</i> <i>Oktober</i>	80%	<i>Baik</i>
7	Meningkatkan profesionalisme aparatur perencana	Persentase aparatur perencana yang ikut diklat bersertifikasi	%	85	90.61%	106.60%	Sangat Baik
8	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappeda Prov. Sulsel	Predikat penilaian implementasi SAKIP oleh Inspektorat provinsi	%	B	B	100%	Sangat Baik
Rata-rata capaian kinerja						94.70%	

Sumber : Bappeda Prov. Sulsel 2016

Dari tabel Tabel 3.3. di atas terdapat 8 (delapan) sasaran strategis yang terdiri dari 7 (tujuh) sasaran strategis masing-masing memiliki satu indikator kinerja dan 1 (satu) sasaran strategis memiliki dua indikator kinerja. Pada Tahun 2015 Dari sembilan indikator kinerja hanya 7 (tujuh) Indikator kinerja mencapai target sedangkan 2 (dua) indikator kinerja yang tidak mencapai target atau pencapaiannya < 100%.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau

tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Perhitungan pencapaian indikator sasaran menggunakan asumsi : Jika **semakin tinggi realisasi**, menunjukkan pencapaian kinerja yang **semakin baik**, atau sebaliknya **realisasi makin rendah** pencapaian kinerja **semakin rendah/ jelek** adalah:

$$\frac{\textit{Presentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian}}{\textit{Rencana Tingkat Capaian}} = \frac{\textit{Realisasi Target}}{\textit{Target}} \times 100 \%$$

III.2 Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Untuk memberikan informasi yang lebih transparan maka hasil pengukuran capaian kinerja selanjutnya dievaluasi dan dianalisis untuk mengetahui faktor-faktor penyebab sehingga target yang ditetapkan dapat tercapai ataupun tidak tercapai. Pelaksanaan program/kegiatan pembangunan tahun 2015 yang dilaksanakan oleh Bappeda Prov.Sulsel merupakan implementasi tahun kedua dari Rencana strategis Tahun 2013 – 2018.Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Rencana strategis Bappeda prov. Sulsel melalui 8(delapan) sasaran strategis dan 9 (sembilan) indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama Bappeda Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2015.

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap setiap indikator kinerja dari sasaran strategis dan melakukan perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya. Hasil analisis capaian kinerja Bappeda Prov. Sulsel Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1

Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas

Sasaran Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas diukur dengan menggunakan indikator kinerja Persentase program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD. Rumusan indikator yang digunakan adalah persentase antara jumlah program RPJMD yang diakomodir dalam program RKPD dibandingkan dengan jumlah program RPJMD yang telah ditetapkan dikalikan seratus persen. Semakin besar angka persentase maka semakin baik kinerja yang telah ditentukan.

Formula yang digunakan untuk menghitung realisasi target adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD}}{\text{Jumlah program RPJMD yang telah ditetapkan}} \times 100 \%$$

Target dan realisasi kinerja sasaran terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut :

Tabel 3.4 Target dan realisasi kinerja sasaran ke-1

NO	Indikator	Capaian 2014 %	2015			Target Akhir Renstra (2018) %	Capaian s/d 2015 terhadap 2018 (%)
			Target %	Realisasi %	Capaian %		
1.	Persentase program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD	102.20%	97	100	103.10%	100	100%

Sumber : Bappeda prov. Sulsel, 2016

Tabel diatas menunjukkan realisasi kinerja sasaran ke-1 dengan indikator kinerja sasaran yaitu persentase program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD sebesar 100

% dibandingkan target yang akan dicapai tahun 2015 sebesar 97 % dimaksud dapat dinaikkan sebesar 3 % . Dari 251 (dua ratus lima puluh satu) Program yang ada dalam RPJMD tahun 2013-2018 dapat diakomodir sebanyak 251 Program dalam RKPD. Capaian kinerja sasaran ke-1 dibandingkan target yang akan dicapai pada tahun 2015 sebesar 97% sedangkan capaian kinerja sasaran pada tahun 2015 jika dibandingkan dengan kondisi pada akhir Renstra tahun 2018 adalah 100 %.

Sasaran terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas dapat dicapai dengan didukung melalui program-program sebagai berikut :

- 1) Program Peningkatan dan pengembangan system perencanaan dan system Evaluasi Kinerja
- 2) Program Perencanaan pembangunan Daerah
- 3) Program pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan Daerah

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 18.273.290.408 dari anggaran sebesar Rp 18.789.916.323 atau 3% dari target. Realisasi output rata-rata sebesar 100%. Realisasi keuangan sebesar 97.25 % dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 103.10 %, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut sebesar 5.85%

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran tersebut adalah :

- a. Adanya koordinasi yang baik antara tim penyusun RKPD dengan tim penyusun APBD dan TAPD
- b. Tingkat kinerja tim penyusun RKPD dan Renja Bappeda cukup baik.

Perencanaan pembangunan yang implementatif

Sasaran Perencanaan pembangunan yang implementatif diukur dengan menggunakan indikator kinerja Persentase rencana kegiatan dalam Renja yang terlaksana melalui DPA SKPD. Rumusan indikator yang digunakan adalah persentase antara jumlah kegiatan dalam DPA SKPD yang sesuai dengan kegiatan dalam Renja SKPD dibagi jumlah kegiatan dalam Renja SKPD dikalikan seratus persen. Semakin besar angka persentase maka semakin baik kinerja yang telah ditentukan.

Formula yang digunakan untuk menghitung realisasi target adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah kegiatan DPA SKPD yang sesuai dengan kegiatan Renja SKPD}}{\text{Jumlah kegiatan dalam Renja SKPD}} \times 100 \%$$

Target dan realisasi kinerja sasaran terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut :

Tabel 3.5 Target dan realisasi kinerja sasaran ke-2

NO	Indikator	Capaian 2014 %	2015			Target Akhir Renstra (2018) %	Capaian s/d 2015 terhadap 2018 (%)
			Target %	Realisasi %	Capaian %		
1.	Persentase rencana kegiatan dalam Renja yang terlaksana melalui DPA SKPD	102.95%	97%	99.01%	102.07%	100	99.01%

Sumber : Bappeda prov. Sulsel, 2016

Tabel diatas menunjukkan realisasi kinerja sasaran ke-2 dengan indikator kinerja sasaran yaitu Persentase rencana kegiatan dalam Renja yang terlaksana melalui DPA SKPD sebesar 99.01% dibandingkan target yang akan dicapai tahun 2015 sebesar 97 % dimaksud dapat dinaikkan sebesar 2.01 % . dari 102 (seratus dua) kegiatan yang ada dalam Renja SKPD dapat dilaksanakan sebanyak 101 (seratus satu) kegiatan melalui DPA SKPD. Capaian kinerja sasaran ke-2 dibandingkan target yang akan dicapai pada tahun 2015 sebesar 102.07 % sedangkan capaian kinerja sasaran pada tahun 2015 jika dibandingkan dengan kondisi pada akhir renstra tahun 2018 adalah 99.01 %.

Sasaran perencanaan pembangunan yang implementatif dapat dicapai dengan didukung melalui program-program sebagai berikut :

- 1) Program Peningkatan pengembangan sistem perencanaan dan system Evaluasi
- 2) Program Peningkatan data dan Informasi
- 3) Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 2.236.247.178 dari anggaran sebesar Rp 2.428.950.000 atau 97% dari target. Realisasi output rata-rata sebesar 100 %. Realisasi keuangan sebesar 92.07% dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 102.07 %, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut sebesar 10 %.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran tersebut adalah :

- a. Adanya kesesuaian kegiatan dokumen renstra dengan dokumen renja SKPD
- b. Adanya koordinasi yang baik antara tim penyusun renja dengan tim penyusun DPA SKPD.

Sasaran Strategis 3

Pemanfaatan dokumen rencana pembangunan daerah yang akuntabel

Sasaran pemanfaatan dokumen Rencana pembangunan Daerah yang akuntabel diukur dengan menggunakan dua indikator kinerja, yaitu :

- a. Komponen keterwakilan masyarakat dalam forum perencanaan partisipatif/Musrenbang. Rumusan indikator yang digunakan adalah keterwakilan delapan komponen masyarakat dalam perencanaan pembangunan/Musrenbang terdiri dari : keterwakilan Pengusaha, Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi masyarakat (ormas), Organisasi keagamaan, organisasi profesi, tokoh masyarakat, dan lembaga donor (JICA, UNICEF) berdasarkan daftar hadir musrenbang provinsi.
- b. Kesesuaian Perencanaan Daerah yang sinkron dengan perencanaan pusat, provinsi dan kab/Kota. Rumusan indikator yang digunakan adalah Jumlah Program dalam RKP yang diakomodir dalam RKPD dibagi Jumlah Program dalam RKP dikalikan seratus persen. Semakin besar angka persentase maka semakin baik kinerja yang telah ditentukan.

Formula yang digunakan untuk menghitung realisasi target adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Program RKP yang diakomodir dalam RKPD}}{\text{Jumlah Program RKP yang ditetapkan}} \times 100 \%$$

Target dan realisasi kinerja sasaran Pemanfaatan dokumen perencanaan pembangunan yang akuntabel dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut :

Tabel 3.6 Target dan realisasi kinerja sasaran ke-3

NO	Indikator	Capaian 2014 %	2015			Target Akhir Renstra (2018) %	Capaian s/d 2015 terhadap 2018 (%)
			Target (komponen dan %)	Realisasi komponen dan %)	Capaian %		
1.	Komponen keterwakilan masyarakat dalam forum perencanaan partisipatif/ musrembang	7	8 Komponen	8 Komponen	100	10	80
2.	Persentase kesesuaian perencanaan daerah yang sinkron dengan perencanaan pusat, provinsi dan kab/Kota	96	97	99.64%	102.7%	100	102.70%
Rata-rata capaian kinerja					101.3%		

Sumber : Bappeda prov. Sulsel, 2016

Tabel diatas menunjukkan realisasi kinerja sasaran ke-3 dengan indikator kinerja sasaran yaitu Komponen keterwakilan masyarakat dalam forum perencanaan partisipatif/ musrembang sebesar 8 komponen dibandingkan target yang akan dicapai tahun 2015 sebesar 8 komponen. Capaian kinerja sasaran ke-3 dibandingkan target yang akan dicapai pada tahun 2015 sebesar 100 % sedangkan capaian kinerja sasaran pada tahun 2015 jika dibandingkan dengan kondisi pada akhir Renstra tahun 2018 adalah 80 %.

Sedangkan indikator kinerja sasaran yaitu Persentase kesesuaian perencanaan daerah yang sinkron dengan perencanaan pusat, provinsi dan kab/Kota sebesar 90,91 %

dibandingkan target yang akan dicapai tahun 2015 sebesar 97 % dimaksud dapat dinaikkan sebesar 2.72 % . Capaian kinerja sasaran ke-3 dibandingkan target yang akan dicapai pada tahun 2015 sebesar 97% sedangkan capaian kinerja sasaran pada tahun 2015 jika dibandingkan dengan kondisi pada akhir renstra tahun 2018 adalah 100 %.

Sasaran pemanfaatan dokumen rencana pembangunan yang akuntabel dapat dicapai dengan didukung melalui program-program sebagai berikut :

- 1) Program Pengembangan Data dan Informasi
- 2) Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- 3) Program Pengendalian dan Evaluasi kebijakan Pembangunan Daerah

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp468.985.443.dari anggaran sebesar Rp 521.190.350 atau 97% dari target. Realisasi output rata-rata sebesar 100 %. Realisasi keuangan sebesar 89.98 % dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 101.3 %, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut sebesar 11,32 %.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran tersebut adalah :

- a. Adanya komitmen yang besar dari legislatif dan eksekutif untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah.
- b. Semakin tingginya forum perwakilan musrenbang yang mengawal usulan masyarakat untuk memastikan bahwa usulan prioritas masyarakat terakomodir dalam APBD.

Sasaran Strategis 4

Konsistensi antara program kegiatan yang dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya

Sasaran Konsistensi antara program kegiatan yang dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya diukur dengan menggunakan indikator kinerja Persentase hasil monitoring dan evaluasi program yang sesuai dengan target dalam dokumen perencanaan. Rumusan indikator yang digunakan adalah persentase antara jumlah program yang sesuai dengan target dalam dokumen RKPD berdasarkan hasil monitoring dan Evaluasi Program RKPD dibagi dengan jumlah Program RKPD di Kalikan seratus persen. Semakin besar angka persentase maka semakin baik kinerja yang telah ditentukan.

Formula yang digunakan untuk menghitung realisasi target adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah program RKPD yang mencapai target}}{\text{Jumlah program RKPD yang telah ditetapkan}} \times 100 \%$$

Target dan realisasi kinerja sasaran terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas dapat dilihat pada tabel 3.7 berikut :

Tabel 3.7 Target dan realisasi kinerja sasaran ke-4

NO	Indikator	Capaian 2014 %	2015			Target Akhir Renstra (2018) %	Capaian s/d 2015 terhadap 2018 (%)
			Target %	Realisasi %	Capaian %		
1.	Persentase hasil monitoring dan evaluasi program yang sesuai dengan target dalam dokumen perencanaan	99.87	97	93.94	97.54	100	97.54

Sumber : Bappeda prov. Sulsel, 2016

Tabel diatas menunjukkan realisasi kinerja sasaran ke-1 dengan indikator kinerja sasaran yaitu Persentase hasil monitoring dan evaluasi program yang sesuai dengan target dalam dokumen perencanaan sebesar 93.94% dibandingkan target yang akan dicapai tahun 2015 sebesar 97 % dimaksud dapat dinaikkan sebesar 3.60 % . dari 251 Program yang ada dalam RKPD yang mencapai target sebanyak 244 Program dalam RKPD. Capaian kinerja sasaran ke-4 dibandingkan target yang akan dicapai pada tahun

2015 sebesar 93.94 % sedangkan capaian kinerja sasaran pada tahun 2015 jika dibandingkan dengan kondisi pada akhir Renstra tahun 2018 adalah 100 %.

Sasaran Konsistensi antara program kegiatan yang dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya dapat dicapai dengan didukung melalui program-program sebagai berikut :

- 1) Program Pengembangan data dan Informasi
- 2) Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- 3) Program Pengendalian dan Evaluasi kebijakan Pembangunan Daerah

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 728.404.654.dari anggaran sebesar Rp 793.872.321 atau 91.75% dari target. Realisasi output rata-rata sebesar 100 %. Realisasi keuangan sebesar 91.75 % dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 97.54 %, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran tersebut adalah :

- a. Faktor ketersediaan sumber daya manusia yang memadai
- b. Faktor ketersediaan sarana dan prasarana
- c. Faktor ketersediaan Anggaran

Sasaran Strategis 5

Pemanfaatan peralatan perkantoran yang berbasis IT

Sasaran Pemanfaatan peralatan perkantoran yang berbasis Informasi Teknologi (IT) diukur dengan menggunakan indikator kinerja Persentase pemenuhan peralatan perkantoran yang berbasis IT. Rumusan indikator yang digunakan adalah persentase antara jumlah peralatan perkantoran yang berbasis IT dibandingkan dengan jumlah keseluruhan peralatan perkantoran dikalikan seratus persen. Semakin besar angka persentase maka semakin baik kinerja yang telah ditentukan.

Formula yang digunakan untuk menghitung realisasi target adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{jumlah peralatan perkantoran yang berbasis IT}}{\text{jumlah keseluruhan peralatan perkantoran}} \times 100 \%$$

Target dan realisasi kinerja sasaran terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas dapat dilihat pada tabel 3.8 berikut :

Tabel 3.8 Target dan realisasi kinerja sasaran ke-5

NO	Indikator	Capaian 2014 %	2015			Target Akhir Renstra (2018) %	Capaian s/d 2015 terhadap 2018 (%)
			Target %	Realisasi %	Capaian %		
1.	Persentase pemenuhan peralatan perkantoran yang berbasis IT	95.96	97	63.38	65.34	100	65.34

Sumber : Bappeda prov. Sulsel, 2016

Tabel diatas menunjukkan realisasi kinerja sasaran ke-5 dengan indikator kinerja sasaran yaitu Persentase pemenuhan peralatan perkantoran yang berbasis IT sebesar 65.34 % dibandingkan target yang akan dicapai tahun 2015 sebesar 97 % . Dari 71 (tujuh puluh satu) jumlah keseluruhan peralatan perkantoran (laptop dan PC komputer) sebanyak 45 jumlah peralatan perkantoran yang berbasis IT . Capaian kinerja sasaran ke-5 dibandingkan target yang akan dicapai pada tahun 2015 sebesar 97 % sedangkan capaian kinerja sasaran pada tahun 2015 jika dibandingkan dengan kondisi pada akhir renstra tahun 2018 adalah 100 %.

Sasaran Konsistensi antara program kegiatan yang dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya dapat dicapai dengan didukung melalui program-program sebagai berikut :

- 1) Program Pelayanan Administrasi perkantoran
- 2) Program Peningkatan kapasitas dan Kinerja SKPD

3) Program Peningkatan pengembangan system perencana dan system Evaluasi kinerja

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 1.444.237.200.dari anggaran sebesar Rp 1.549.825.000 atau 93.19% dari target. Realisasi output rata-rata sebesar 96 %. Realisasi keuangan sebesar 93.19 % dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 65,34 %, maka tidak terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Faktor penghambat pencapaian sasaran tersebut adalah :

- a. Beberapa peralatan kerja memiliki jam operasional yang tinggi sehingga rentan mengalami kerusakan
- b. Beberapa peralatan dan perlengkapan kantor telah mengalami rusak berat namun masih tercatat sebagai aset SKPD.
- c. Tidak dilakukan perawatan secara berkala terhadap sarana dan prasarana kantor, namun cenderung hanya dilakukan perbaikan apabila mengalami kerusakan.

Strategi pemecahan masalah:

- a. Perlu dilakukan perawatan secara berkala terhadap peralatan kerja yang memiliki jam operasional yang tinggi untuk menghindari kerusakan.
- b. Penghapusan aset terhadap peralatan dan perlengkapan kantor yang mengalami rusak berat.
- c. Pemberlakuan skala prioritas baik pengadaan baru maupun perbaikan sarana dan prasarana kantor.

Sasaran Strategis 6

Data dan informasi pembangunan yang aktual dan Valid

Sasaran data dan informasi pembangunan yang actual dan valid diukur dengan menggunakan indikator kinerja data statistik tersaji tepat waktu. Rumusan indikator

yang digunakan adalah ketepatan waktu penyediaan dokumen sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Semakin tepat waktu penyediaan dokumen statistik maka semakin baik kinerja yang telah ditentukan.

Formula yang digunakan untuk menghitung realisasi target adalah sebagai berikut:

Ketepatan waktu penyediaan dokumen statistik berdasarkan target bulan yang telah ditetapkan.

Target dan realisasi kinerja sasaran terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas dapat dilihat pada tabel 3.9 berikut :

Tabel 3.9 Target dan realisasi kinerja sasaran ke-6

NO	Indikator	Capaian 2014 %	2015			Target Akhir Renstra (2018) %	Capaian s/d 2015 terhadap 2018 (%)
			Target %	Realisasi %	Capaian %		
1.	Data statistik tersaji tepat waktu	-	100	80	80	100	80
	a. Informasi pembangunan daerah Sulsel		Sept	Sept			
	b. Indikator pembangunan ekonomi Sulsel		Sept	Sept			
	c. Indikator pembangunan sosial Sulsel		Sept	Okt			
	d. Profil pembangunan daerah		Okt	Okt			
	e. Sulsel dalam angka		Okt	Okt			

Sumber : Bappeda prov. Sulsel, 2016

Berdasarkan evaluasi terhadap indikator terhadap data tersaji tepat waktu realisasi sebesar 80 % dimana sebanyak 4 (empat) dokumen dapat tersaji sesuai target waktu dan 1 (satu) dokumen tidak dapat tersaji secara tepat waktu yaitu indikator pembangunan sosial Sulsel. Tabel diatas menunjukkan realisasi kinerja sasaran ke-6 dengan indikator kinerja sasaran yaitu Data statistik tersaji tepat waktu sebesar 80 % dibandingkan target

yang akan dicapai tahun 2015 sebesar 100 %. Capaian kinerja sasaran ke-6 dibandingkan target yang akan dicapai pada tahun 2015 sebesar 100 % sedangkan capaian kinerja sasaran pada tahun 2015 jika dibandingkan dengan kondisi pada akhir renstra tahun 2018 adalah 100 %.

Sasaran data dan informasi pembangunan yang aktual dan valid dapat dicapai dengan didukung melalui program-program sebagai berikut :

- 1) Program Pengembangan data dan Informasi
- 2) Program Perencanaan pembangunan Daerah
- 3) Program Pengendalian dan Evaluasi kebijakan pembangunan daerah

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 822.738.650. dari anggaran sebesar Rp 835.621.800 atau 98.46% dari target. Realisasi output rata-rata sebesar 100 %. Realisasi keuangan sebesar 98.46 % dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 80 %, maka tidak terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Faktor penghambat pencapaian sasaran tersebut adalah :

- Keterlambatan dalam pengolahan data

Strategi pemecahan masalah/upaya perbaikan yang akan dilakukan :

- Lebih mengintensifkan koordinasi dengan Biro Pusat Statistik (BPS) dan pengecekan kemajuan pengolahan data secara rutin.

Sasaran Strategis 7

Meningkatkan profesionalisme aparatur perencana

Sasaran meningkatkan profesionalisme aparatur perencana diukur dengan menggunakan indikator kinerja Persentase aparatur perencana yang ikut Diklat bersertifikasi. Rumusan indikator yang digunakan adalah jumlah aparatur perencana yang mengikuti Diklat bersertifikasi dibagi jumlah aparatur perencana yang mengikuti diklat pada tahun tersebut dikalikan seratus persen. Semakin besar angka persentase maka semakin baik kinerja yang telah ditentukan.

Formula yang digunakan untuk menghitung realisasi target adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah aparatur perencana yang mengikuti diklat bersertifikasi}}{\text{jumlah aparatur perencana yang mengikuti diklat pada tahun tersebut}} \times 100 \%$$

Target dan realisasi kinerja sasaran terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas dapat dilihat pada tabel 3.10 berikut :

Tabel 3.10 Target dan realisasi kinerja sasaran ke-7

NO	Indikator	Capaian 2014 %	2015			Target Akhir Renstra (2018) %	Capaian s/d 2015 terhadap 2018 (%)
			Target %	Realisasi %	Capaian %		
1.	Persentase aparatur perencana yang ikut diklat bersertifikasi	73.97	85	89.71	105.54	100	105.54

Sumber : Bappeda prov. Sulsel, 2016

Tabel diatas menunjukkan realisasi kinerja sasaran ke-7 dengan indikator kinerja sasaran yaitu Persentase aparatur perencana yang ikut diklat bersertifikasi sebesar 89.71 % dibandingkan target yang akan dicapai tahun 2015 sebesar 85 % dimaksud dapat dinaikkan sebesar 4.71 % . Dari 27 (dua puluh tujuh) Orang aparatur perencana yang mengikuti diklat bersertifikasi ternyata yang lulus dan memperoleh sertifikat sebanyak 22 (dua puluh dua) orang. Capaian kinerja sasaran ke-7 dibandingkan target yang akan dicapai pada tahun 2015 sebesar 85 % sedangkan capaian kinerja sasaran pada tahun 2015 jika dibandingkan dengan kondisi pada akhir Renstra tahun 2018 adalah 95 %.

Sasaran meningkatkan profesionalisme aparatur perencana dapat dicapai dengan didukung melalui program-program sebagai berikut :

- 1) Program Pelayanan Administrasi perkantoran
- 2) Program Peningkatan kapasitas dan kinerja SKPD
- 3) Program Peningkatan pengembangan system perencana dan system evaluasi kinerja

Realisasi Anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 148.656.393.dari anggaran sebesar Rp 165.700.000. atau 89.71% dari target. Realisasi output rata-rata sebesar 100 %. Realisasi keuangan sebesar 89.71 % dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 105.54 %, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut sebesar 15.83 %.

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian sasaran tersebut adalah :

- a. Minat pegawai bappeda sangat besar untuk mengikuti Diklat fungsional perencana dan Diklat lainnya.
- b. Adanya tawaran dari lembaga/instansi vertikal untuk mengikuti Diklat.

Sasaran Strategis 8

Meningkatkan akuntabilitas kinerja bappeda Prov. Sulsel

Sasaran meningkatkan akuntabilitas kinerja Bappeda Prov. sulsel diukur dengan menggunakan indikator kinerja Predikat penilaian implementasi SAKIP oleh Inspektorat provinsi. Rumusan indikator yang digunakan adalah predikat penilaian implementasi SAKIP Bappeda oleh Inspektorat provinsi terdiri atas tujuh kategori penilaian yaitu (AA,A,BB,B,CC,C, dan D).

Formula yang digunakan untuk menghitung realisasi target adalah sebagai berikut:

Predikat penilaian implementasi SAKIP tahun 2015 Bappeda oleh inspektorat Provinsi

Target dan realisasi kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappeda Prov. Sulsel, dapat dilihat pada tabel 3.11 berikut :

Tabel 3.11 Target dan realisasi kinerja sasaran ke-8

NO	Indikator	Capaian 2014 %	2015			Target Akhir Renstra (2018) %	Capaian s/d 2015 terhadap 2018 (%)
			Target %	Realisasi %	Capaian %		
1.	Predikat penilaian implementasi SAKIP oleh Inspektorat provinsi	CC	B	Belum diketahui	Belum diketahui	BB	CC

Sumber : Bappeda prov. Sulsel, 2016

Berdasarkan hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilaksanakan oleh Inspektorat provinsi Sulawesi Selatan Nomor 700.04/1700/A.1/itprov, tanggal 26 Mei 2015, Badan perencanaan pembangunan Daerah mendapat nilai 63,09 dengan predikat penilaian “ B ” dari target tahun 2014 adalah “CC”.

Sasaran meningkatkan akuntabilitas kinerja Bappeda Prov. Sulsel dapat dicapai dengan didukung melalui program-program sebagai berikut :

- 1) Program Peningkatan pengembangan sistem perencana dan sistem evaluasi kinerja
- 2) Program Pengembangan data dan Informasi
- 3) Program Perencanaan pembangunan Daerah

Realisasi Anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 23.719.800.dari anggaran sebesar Rp 24.000.000 atau 98.83% dari target. Realisasi output rata-rata sebesar 100 %. Realisasi keuangan sebesar 98.83 % dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100 %, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut sebesar 1,17%.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran tersebut adalah :

- a. Koordinasi antara tim penyusun Laporan kinerja dengan tim evaluasi SAKIP inspektorat provinsi Sulawesi Selatan.
- b. Peningkatan kualitas dokumen SAKIP dalam rangka pencapaian sasaran yang berorientasi hasil.

III.3 Akuntabilitas Keuangan

Realisasi pelaksanaan anggaran yang dikelola BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2015 adalah sebesar Rp 44.676.939.138 (97.16%) dengan rincian untuk belanja tidak langsung Rp 13.863.258.155 (99.12% dari total realisasi) dan belanja langsung sebesar Rp 30.813.680.983. (96.31% dari total realisasi).

Realisasi anggaran belanja langsung untuk program utama sebesar Rp 30.813.680.983 (97.25% dari total anggaran yang dilokasikan untuk program utama sebesar Rp 18.789.916.323) sedangkan realisasi anggaran belanja langsung program pendukung sebesar Rp 5.276.508.158 (96.41.% total anggaran yang dilokasikan untuk program pendukung sebesar Rp 5.473.194.531), dan realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp 13.863.258.155 (99.12 % dari total anggaran dari yang dialokasikan pada anggaran belanja tidak langsung).

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif sangat baik. Pencapaian sasaran yang baik jika dibandingkan penyerapan anggaran yang tidak sampai 100% dikarenakan adanya efisiensi anggaran. Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2015 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel Tabel III-12. berikut:

Tabel III.12. Anggaran dan realisasi belanja langsung per sasaran Tahun 2015

NO	Sasaran	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% capaian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% capaian
1.	Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas	97	100%	103.10	18.789.916.329	18.273.290.408	97,25
2.	Perencanaan pembangunan yang implementatif	97	98.02%	102.07	2.428.950.000	2.236.247.178	92.07
3.	Pemanfaatan dokumen rencana pembangunan daerah yang akuntabel	97	99.64%	102.7	521.190.350	468.985.443	89.98
4.	Konsistensi antara program kegiatan yang dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya	97	91.75%	94.59	793.872.321	728.404.654	91.75
5.	Pemanfaatan peralatan perkantoran yang berbasis IT	97	63.38	65.34	1.549.825.000	1.444.237.200	93.19
6.	Data dan informasi pembangunan yang aktual dan Valid	100	80.00	80.00	835.621.800	822.738.650	98.46
7.	Meningkatkan profesionalisme aparatur perencana	85	89.71	105.54	165.700.000	148.656/393	89.71
8.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappeda Prov. Sulsel	B	Belum diketahui	100%	24.000.000	23.719.800	98.83
Jumlah					45.982.455.399	44.676.939.138	97.16%
Belanja langsung					31.995.593.832	30.813.680.938	96.31%
Belanja tidak langsung					13.986.861.567	13.863.258.155	99.12%
Total belanja					45.982.455.399	44.676.939.138	97,16%

Sumber : Bappeda Sulsel 2016

Tabel III. 13. Tingkat efisiensi anggaran dan realisasi belanja langsung per sasaran tahun 2015

NO	Sasaran	Indikator kinerja	% capaian kinerja	% serapan anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas	Persentase program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD	103.10	97.25	5.85
2.	Perencanaan pembangunan yang implementatif	Persentase rencana kegiatan dalam Renja yang terlaksana melalui DPA SKPD	102.07	92.07	10.00
3.	Pemanfaatan dokumen rencana pembangunan daerah yang akuntabel	Komponen keterwakilan masyarakat dalam forum perencanaan partisipatif/ musrembang	100	80	20
		Persentase kesesuaian perencanaan daerah yang sinkron dengan perencanaan pusat, provinsi dan kab/Kota	102.7	89.98	12.72
4.	Konsistensi antara program kegiatan yang dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya	Persentase hasil monitoring dan evaluasi program yang sesuai dengan target dalam dokumen perencanaan	97.54	93.94	3.60
5.	Pemanfaatan peralatan perkantoran yang berbasis IT	Persentase pemenuhan peralatan perkantoran yang berbasis IT	65.34	93.19	(27.85)
6.	Data dan informasi pembangunan yang aktual dan Valid	Data statistik tersaji tepat waktu	80.00	98.46	(8.46)
7.	Meningkatkan profesionalisme aparatur perencana	Persentase aparatur perencana yang ikut diklat bersertifikasi	105.54	89.71	15.63
8.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappeda Prov. Sulsel	Predikat penilaian implementasi SAKIP oleh Inspektorat provinsi	100	98.83	1.17

Sumber : Bappeda Sulsel 2016

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ IP) BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan salah satu bentuk pertanggungjawaban terhadap program dan kegiatan SKPD selama tahun anggaran 2015, juga sebagai badan yang bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan di daerah, juga merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 perubahan atas Permenpan RB. Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator Kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan beserta target dan realisasinya dirinci dalam tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Bappeda Provinsi Sulsel Tahun 2015

NO .	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	KODE
1	Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas	Persentase program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD	%	97	98.02%	101.05%	Sangat Baik/ Baik
2	Perencanaan pembangunan yang implementatif	Persentase rencana kegiatan dalam Renja yang terlaksana melalui DPA SKPD	%	97	72.07%	74.30%	Sedang
3	Pemanfaatan dokumen rencana pembangunan daerah yang akuntabel	a. Komponen keterwakilan masyarakat dalam forum perencanaan partisipatif/musrembang b. Persentase kesesuaian perencanaan daerah yang sinkron dengan perencanaan pusat, provinsi dan kab/Kota	Komponen %	8 97	89.98% 89.98%	100% 92.75%	Sangat Baik/ Baik Sangat Baik/ Baik
NO .	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KODE

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

						KINE RJA (%)	
4	Konsistensi antara program kegiatan yang dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya	Persentase hasil monitoring dan evaluasi program yang sesuai dengan target dalam dokumen perencanaan	%	97	91.75%	94.59%	Sangat Baik/ Baik
5	Pemanfaatan peralatan perkantoran yang berbasis IT	Persentase pemenuhan peralatan perkantoran yang berbasis IT	%	97	98.46%	101.51%	Sangat Baik/ Baik
6	<i>Data dan informasi pembangunan yang aktual dan Valid</i>	<i>Data statistik tersaji tepat waktu</i> <i>a. Informasi pembangunan daerah Sulsel</i> <i>b. Indikator pembangunan ekonomi Sulsel</i> <i>c. Indikator pembangunan sosial Sulsel</i> <i>d. Profil pembangunan daerah</i> <i>e. Sulsel dalam angka</i>	<i>Bulan</i> <i>Bulan</i> <i>Bulan</i> <i>Bulan</i>	<i>Sept</i> <i>Sept</i> <i>Okto</i> <i>ber</i> <i>Okto</i> <i>ber</i>	<i>96.58%</i> <i>96.58%</i> <i>96.58%</i> <i>96.58%</i> <i>96.58%</i>	100%	<i>Sangat Baik/ Baik</i>
7	Meningkatkan profesionalisme aparatur perencanaan	Persentase aparatur perencanaan yang ikut diklat bersertifikasi	%	85	90.61%	106.60%	Sangat Baik/ Baik

8	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappeda Prov. Sulsel	Predikat penilaian implementasi SAKIP oleh Inspektorat provinsi	%	B	B	100%	Sangat Baik/ Baik
----------	---	---	---	----------	----------	-------------	----------------------

Sumber : Bappeda Prov. Sulsel 2016

Dari tabel Tabel .di atas terdapat 8 (delapan) sasaran strategis yang terdiri dari 7 (tujuh) sasaran strategis masing-masing memiliki satu indikator kinerja dan 1 (satu) sasaran strategis memiliki dua indikator kinerja. Pada Tahun 2015, kesembilan realisasi indikator kinerja tersebut telah mencapai **target yang ditetapkan**

telah mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa semua indikator kinerja telah memenuhi klasifikasi **sangat baik** berdasarkan Permendagri Nomor 54 tahun 2010.

Dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini menggambarkan tingkat capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) pada tahun anggaran 2015 yang merupakan tolok ukur tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Pencapaian realisasi penggunaan anggaran yang terbagi dalam 5 (lima) sasaran, 6 program dan 101 kegiatan dan didukung oleh anggaran APBD TA. 2015. Dalam pelaksanaannya pada total belanja daerah yang diperoleh sebesar Rp. **45.982.455.399,-** yang terealisasi sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp. **44.676.939.137,-** atau sebesar **97,16%** dan realisasi fisik sebesar **99,99 %**, terdapat sisa anggaran sebesar Rp. **1.305.516.262,-**.

Belanja daerah ini terdiri atas : a) Belanja tidak langsung sebesar **Rp. 13.986.861.567,-** yang terealisasi sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp. **13.863.258.155,-** atau sebesar **99,12%** dan realisasi fisik sebesar **100,00%**, dan b) Belanja langsung sebesar **Rp. 31.995.593.832,-** yang terealisasi sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar **Rp. 30.813.680.982,-** atau sebesar **96,31%** dan realisasi fisik sebesar **99,97%**. Adapun tingkat capaian outcome sebesar **100,00 %**. Selanjutnya merujuk pada Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diterbitkan oleh Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka skala pengukuran kinerja yang diperoleh oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sulawesi Selatan termasuk dalam kategori **”Sangat Baik”** hal ini ditunjukkan oleh tingkat capaian kinerja output 99,99% (input dana) sebesar 97,16% dan tingkat capaian kinerja outcome sebesar 100,00%.

Sangat disadari, bahwa penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ IP) BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan ini masih belum maksimal sebagaimana yang diharapkan, namun apa yang telah dicapai merupakan modal dasar sebagai upaya perbaikan maupun penajaman hasil yang telah dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ IP) BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan ini merupakan pelaksanaan program dan kegiatan yang tetap mengacu pada pelaksanaan Rencana Strategis BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan yang tetap mengacu pada RPJMD dan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan.

Demikian penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ IP) BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan ini, sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban yang akuntabel yang diiringi harapan semoga

ditahun mendatang, keberhasilan pencapaian kinerja kegiatan perencanaan dalam lingkup BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan senantiasa mengiringi upaya dan kemajuan perencanaan kedepan.

**BAPPEDA PROVINSI SULAWESI SELATAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

NO	URAIAN		SUMBER DATA
	SASARAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI	
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Aparatur Perencanaan	- Presentasi disiplin pegawai Bappeda	Bappeda
		- Banyaknya Pegawai yang mengikuti Pendidikan & Pelatihan perencanaan bagi 121 pegawai	Bappeda
			Bappeda
		pegawai Bappeda dari 121 pegawai Bappeda Prov. Sulsel	Bappeda
2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan	- Presentasi ketersediaan data dan informasi pembangunan	Bappeda & BPS
3	Meningkatnya Kualitas Sasaran dan Prasarana Kerja	- Presentasi efektifitas pelayanan administrasi perkantoran	Bappeda
		- Presentasi jumlah sarana dan prasarana aparatur	Bappeda
4	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan	- Presentasi informasi data dan laporan penyelenggaraan Pemerintahan	Bappeda
		- Presentasi efektifitas perencanaan tahunan pembangunan daerah	Bappeda
		- Presentasi efektifitas perencanaan pembangunan ekonomi	Bappeda
		- Presentasi efektifitas pembangunan sosial budaya	Bappeda
		- Presentasi efektifitas perencanaan prasarana wilayah & SDA	Bappeda
5	Meningkatnya Kerjasama Antara sektor Antar Daerah - Wilayah	- Meningkatkan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Bappeda
		- Presentasi kerjasama pembangunan daerah	Bappeda

PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatkan Kualitas Aparatur dan Kapasitas Kelembagaan Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan		
	Meningkatnya Kualitas Aparatur Perencana	Presentase disiplin Pegawai Bappeda	100%
		Jumlah Pegawai Bappeda yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Perencana	100%
		Jumlah pejabat Fungsional Perencanaan yang mengikuti Diklat Bappeda	25 orang
	Meningkatnya Kualitas Perencana Pembangunan	Presentase ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan	100%
	Meningkatnya Sarana dan prasana	Presentase Efektifitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	
		Presentase Sarana dan Prasarana	100%
2	Terciptanya Kinerja Pelaksana Pembangunan Pemerintah Provinsi dan wilaya		
	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Bappeda Provinsi Sulawesi selatan	Jumlah Dokumen/Laporan Informasi Data dan Laporan penyelenggaraan Pemerintah	11 dokumen dan 1 laporan
		Jumlah Dokumen/ Laporan Perencanaan Tahunan Pembangunan Daerah	119 Dokumen dan 3 Laporan
		Presentase Efektifitas Perencana Pembangunan Ekonomi	100%
		Peresentase Efektifitas Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	100%
		Presentase Efektifitas Perencanaan Pembangunan Prasarana wilaya dan Air	100%
	Meningkatnya Kerjasama Antar Sektor dan Antar Wilaya	Presentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencana	100%
		Presentase Kerjasama Pembangunan daerah	100%

1 Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan 26 Kegiatan

Rp. 4.885.619.531,-

2 Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD dengan 12 Kegiatan

Rp. 2.080.625.000,-

3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sisten Evaluasi

Rp. 176.516.450,-

4 Program Peningkatan Data/ Informasi dengan 7 kegiatan

Rp. 3.192.383.707,-

5 Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan 49 kegiatan

Rp. 16.516.291.323,-

6 Program Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan Daerah 6 kegiatan

Rp. 2.044.157.821,-

Total Rp.28.895.593.832 (Dua puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Sembilan puluh Lima juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah)

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS)
TAHUN : 2015

Instansi : Bappeda Propinsi Sulawesi Selatan

Sasaran		Indikator Sasaran	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi	Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian	Keterangan
1	2		3	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kualitas Aparatur perencanaan	- Meningkatnya disiplin aparatur daerah	persen	100	100	100 %	
		- Meningkatnya kualitas sumber daya manusia aparatur	persen	100	100	100 %	
		- Meningkatnya kualitas kapasitas aparatur	persen	100	100	100 %	
2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan	- Meningkatnya kapasitas kelembagaan pembangunan daerah	persen	100	100	100 %	
		- Meningkatnya ketersediaan data dan informasi pembangunan	persen	100	100	100 %	
3	Meningkatnya Kualitas Sasaran dan Prasarana Kerja	- Meningkatnya efektifitas pelayanan administrasi perkantoran	persen	100	100	100 %	
		- Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	persen	100	100	100 %	
4	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Bappeda Provinsi Sulawesi Seltan	- Tersedianya infomasi data dan laporan penyelenggaraan Pemerintahan	persen	100	100	100 %	
		- Meningkatnya efektifitas perencanaan tahunan pembangunan daerah	persen	100	100	100 %	
		- Meningkatnya efektifitas perencanaan pembangunan ekonomi	persen	100	100	100 %	
		- Meningkatnya efektifitas pembangunan sosial budaya	persen	100	100	100 %	
		- Meningkatnya efektifitas perencanaan prasarana wilayah & SDA	persen	100	100	100 %	
5	Meningkatnya Kerjasama Antara sektor Antar Daerah - Wilayah	- Meningkatnya kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	persen	100	100	100 %	
		- Meningkatnya kerjasama pembangunan daerah	persen	100	100	100 %	

**BAPPEDA PROVINSI SULAWESI SELATAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

NO	URAIAN		SUMBER DATA
	SASARAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI	
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Aparatur Perencanaan	- Presentasi disiplin pegawai Bappeda	Bappeda
		- Banyaknya Pegawai yang mengikuti Pendidikan & Pelatihan perencanaan bagi 127 pegawai	Bappeda
			Bappeda
		pegawai Bappeda dari 127 pegawai Bappeda Prov. Sulsel	Bappeda
2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan	- Presentasi ketersediaan data dan informasi pembangunan	Bappeda & BPS
3	Meningkatnya Kualitas Sasaran dan Prasarana Kerja	- Presentasi efektifitas pelayanan administrasi perkantoran	Bappeda
		- Presentasi jumlah sarana dan prasarana aparatur	Bappeda
4	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan	- Presentasi informasi data dan laporan penyelenggaraan Pemerintahan	Bappeda
		- Presentasi efektifitas perencanaan tahunan pembangunan daerah	Bappeda
		- Presentasi efektifitas perencanaan pembangunan ekonomi	Bappeda
		- Presentasi efektifitas pembangunan sosial budaya	Bappeda
		- Presentasi efektifitas perencanaan prasarana wilayah & SDA	Bappeda
5	Meningkatnya Kerjasama Antara sektor Antar Daerah - Wilayah	- Meningkatkan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Bappeda
		- Presentasi kerjasama pembangunan daerah	Bappeda

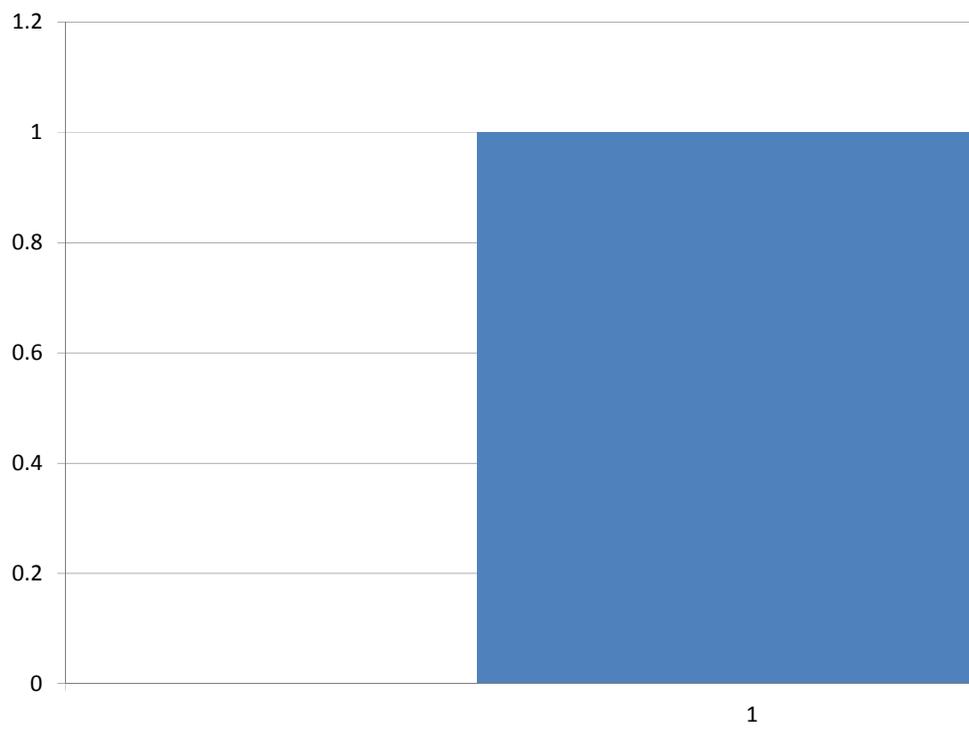
Makassar, 1 April 2015

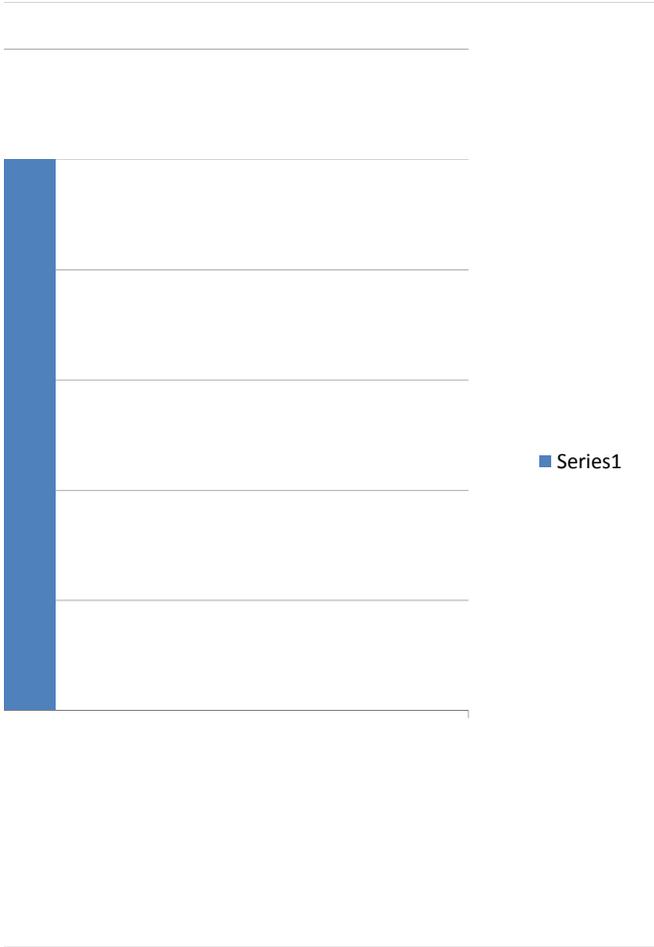
**Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan
Kepala,**

Drs.H.Andi Yaksan Hamzah,MS.

Pangkat: Pembina Utama Madya

Nip. 19550826 197911 1 002





**PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2015**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan	Anggaran
1	2	3	5	6
1 Meningkatkan Kualitas Aparatur dan Kapasitas Kelembagaan Perencana Bappeda Propinsi Sulawesi Selatan	- Persentasi pelayanan Administrasi perkantoran yang dihasilkan Bappeda Propinsi Sulawesi Selatan	100%	I. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN (27 kegiatan)	4,103,556,000
	- Terwujudnya Pelayanan jasa surat menyurat untuk Peningkatan pelayanan Administrasi perkantoran	Perangko kilat 25 lembar kilat khusus 30 lembar, Materai 3000- 2600 lembar, Materai 6000 1200 lembar, paket pengiriman 21 kali	1. Penyedia jasa surat-menyurat	15.700,000
	- Termanfaatkannya laporan Administrasi pengelolaan barang dan jasa Bappeda untuk peningkatan kualitas sistem pelaporan	Tersedianya laporan ketatalaksanaan Administrasi berupa Updating data aset, laporan barang dan jasa RKPBM, DKPBM/DPBM dan realisasi pengadaan barang dan jasa	2. Penyusunan pengelolaan barang dan jasa Bappeda prov.sulsel	127.050,000
	- Jumlah dokumen pelaksanaan program peningkatan kapasitas dan Kinerja SKPD	21 Dokumen	II. PENINGKATAN KAPASITAS DAN KINERJA SKPD (12 kegiatan)	1.934.723.100
	- Termanfaatkannya dokumen rencana kerja tahunan Bappeda dalam pelaksanaan kegiatan Bappeda	Tersedianya informasi rencana kerja tahunan	3. Penyusunan rencana kerja tahunan	34.180.000
	- Jumlah dokumen pelaksanaan Program peningkatan pengembangan Sistem perencanaan dan sistem Evaluasi kinerja SKPD	2 Dokumen	III. PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN DAN SISTEM EVALUASI KINERJA SKPD (3 kegiatan)	212.106.600
- Terukurnya capaian kinerja Bappeda prov.sulsel	Tersusunnya 1 dokumen LAKIP Bappeda prov.sulsel	4. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Bappeda prov.sulsel	58.075.000	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan	Anggaran
1	2	3	5	6
2 Terciptanya kinerja pelaksana pembangunan pemerintah provinsi dan wilayah	<p>-Jumlah dokumen dalam melaksanakan pengembangan data dan informasi pada Bappeda provinsi sulawesi selatan</p> <p>-Termanfaatkannya data dan informasi pembvangan prov. Sulsel sebagai bahan untuk penyusunan perencanaan</p> <p>-Jumlah dokumen dalam melaksanakan perencanaan pembangunan daerah provinsi selatan</p> <p>-Termanfaatkannya dokumen hasil koordinasi perencanaan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup untuk peningkatan kualitas perencanaan bidang SDA dan Praswil</p> <p>-Termanfaatkannya rekomendasi program kerjasama BLD.Sosbud untuk peningkatan kualitas perencanaan bidang SDM dan pengembangan kelembagaan</p>	<p>4 Dokumen</p> <p>Tersedianya 9 dokumen data dan informasi pembangunan daerah</p> <p>160 Dokumen</p> <p>Tersusunnya 17 dokumen hasil pelaksanaan koordinasi pengelolaan lingkungan hidup dan SDA</p> <p>Tersusunnya 6 dokumen laporan hasil pelaksanaan kerjasama pembangunan bidang SDM dan pengembangan kelembagaan</p>	<p>IV.PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI (7 kegiatan)</p> <p>5.Publikasi data dan informasi pembangunan daerah</p> <p>V.PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (50 kegiatan)</p> <p>6.Koordinasi perencanaan, pelaksanaan,dan pengendalian pengelolaan lingkungan hidup dan SDA)</p> <p>7. Pengembangan kerjasama pembangunan bidang Sosbud dan pengembangan kelembagaan</p>	<p>2.851.049.500</p> <p>1.137.685.000</p> <p>23.684.884.850</p> <p>1.518.009.550</p> <p>575.400.000</p>

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan	Anggaran
1	2	3	5	6
	-Termanfaatkannya dokumen hasil koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi untuk peningkatan kualitas perencanaan pembangunan	Tersusunnya 9 dokumen laporan pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	8.Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	1.380.825.000
	:-Termanfaatkannya dokumen RKPD Prov.sulsel tahun 2015	Tersedianya 1 dokumen rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Tahun 2015	9.Penetapan RKPD	143.308.400
	-Jumlah dokumen dalam melaksanakan perencanaan dan pengendalian pengembangan daerah Provinsi sulawesi selatan	13 Dokumen	VI. PENGENDALIAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH (5 kegiatan)	2.102.704.950
	-Termanfaatkannya laporan Monitoring dan pelaporan untuk peningkatan upaya pengendalian pembangunan prov.sulsel	Tersusunnya 2 Dokumen hasil Monitoring kegiatan pembangunan APBN dan APBD prov.sulsel	10.Monitoring dan evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	752.772.550
				34.889.025.000S

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN BAPPEDA PROV.SULSEL

TAHUN : 2015

Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Presentasi Pencapaian		Ket
					Realisasi	Tingkat Capaian (Target)	
2		3	4	5	6	7	8
Program pelayanan administrasi perkantoran		Inputs					
1.1	Penyediaan Jasa Surat-menyurat	<i>Biaya</i>	Rp	7,900,000	7,200,000	91.14	99,99
		Output Layanan administrasi persuratan terdiri dari:					
		- Perangko Kilat	Lembar	20	20	100.00	
		- Kilat Khusus	Lembar	30	30	100.00	
		- Surat Tercatat	Lembar	30	30	100.00	
		- Pemakaian materai 6.000	Lembar	1200	1200	100.00	
		- Paket Pengiriman	Kali	21	21	100.00	
		Outcome Terwujudnya pelayanan jasa surat menyurat untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran	persen	100.00	100.00	100.00	

Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Presentasi Pencapaian		Ket
					Realisasi	Tingkat Capaian (Target)	
2	3	4	5	6	7	8	
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Inputs <i>Biaya</i>	Rp	114.000,00	103,335,320	90.65	
		Output Layanan Jasa komunikasi terdiri dari: - Pemakaian Jasa pulsa Telp (SLJJ & Lokal) - Pemakaian jasa Provider dan Internet	bulan bulan	12 12	12 12	100.00 100.00	
		Outcome - Terselenggaranyalayanan jasa komunikasi sumber daya Air dan Listrik	persen	100.00	100.00	100.00	
1.3	Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Inputs <i>Biaya</i>	Rp	118,000,000	117,950,000	99.66	
		Output Jumlah dokumen penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Triwulan	1	1	100.00	
		Outcome - Tersedianya peralatan kantor yang siap pakai guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Kantor Bappeda Prop. Sulsel	persen	100.00	100.00	100.00	
1.4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Inputs <i>Biaya</i>	Rp	197,501,339	197,491,800	100.00	
		Output Layanan jasa kebersihan kantor terdiri dari: - Layanan kebersihan ruang kerja dan kantor - Layanan kebersihan ruang Rapat - Layanan kebersihan pekarangan & tempat parkir - Layanan kebersihan kamar Mandi	lantai Luas m2 Luas m2 km/wc	1 400 3000 10	1 400 3000 10	100.00 100.00 100.00 100.00	
		Outcome Terwujudnya sanitasi dan kebersihan kantor yang baik untuk meningkatkan kenyamanan dalam bekerja	persen	100.00	100.00	100.00	
1.5	penyediaan jasa perbaikan peralatan kinerja	Inputs <i>Biaya</i>	Rp	4,200,000	3,920,000	93.33	
		Output Perbaikan Peralatan Kerja : - Service dan Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	buah	7	7	100.00	
		Outcome Termanfaatnya tabung pemadam kebakaran yang layak pakai untuk pengamanan kemungkinan bahaya kebakaran pada kantor Bappeda prov.sulsel	persen	100.00	100.00	100.00	

Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Presentasi Pencapaian		Ket
					Realisasi	Tingkat Capaian (Target)	
2	3	4	5	6	7	8	
1.6	penyediaan alat tulis kantor (ATK)	Inputs Biaya	Rp	54,800,000	54,785,000	99.97	
		Output - Alat Tulis Kantor (Bahan pakai habis)	Jenis	50	50	100.00	
		Outcome Termanfaatnya kebutuhan alat tulis kantor untuk keperluan dinas tepat pada waktunya	persen	100.00	100.00	100.00	
1.7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Inputs Biaya	Rp	22,000,000	21,871,000	99.41	
		Output Bahan Cetak dan penggandaan berupa : - Bahan cetakan - Foto copy - Penjilidan	Jenis Lembar Buku	15 22,000 690	15 22,000 690	100.00 100.00 100.00 100.00	
		Outcome Termanfaatnya bahan cetakan dan penggandaan serta jilid bahan sesuai untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Bappeda Prop. Sulsel	persen	100.00	100.00	100.00	
1.8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Inputs Biaya	Rp	30,000,000	30,000,000	100.00	
		Output Bahan listrik pakai habis terdiri dari: - Balon lampu - Travo & Stater - MCB - Baterai kering	buah buah & dos buah lusin	546 144 dan 12 50 50	546 144 dan 12 50 50	100.00 100.00 100.00 100.00	
		Outcome Termanfaatnya komponen alat listrik pakai habis untuk keperluan komponen penerangan yang rusak sesuai kebutuhan 1 TA	persen	100.00	100.00	100.00	

Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Presentasi Pencapaian		Ket
					Realisasi	Tingkat Capaian (Target)	
2	3	4	5	6	7	8	
1.9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Inputs <i>Biaya</i>	Rp	1,549,825,000	1,444,287,200	93.19	
		Output Tersedianya peralatan kantor yang layak pakai untuk keperluan pelayanan pada kantor Bappeda Prov. Sulsel - kursi sofa - komputr PC - Note Book	set unit Unit	1 21 14	1 21 14	100.00 100.00 100.00	
		Outcome Termanfaatkannya peralatan kantor yang layak pakai untuk keperluan pelayanan pada kantor Bappeda Prov. Sulsel	persen	100.00	100.00	100.00	
1.1	penyediaan jasa administrasi keuangan	Inputs <i>Biaya</i>	Rp	599,675,000	596,787,250	99.52	
		Output Layanan jasa administrasi keuangan terdiri dari: Supervisi SPJ Bulanan SPP/SPM Kegiatan SPP/SPM Gaji Laporan KP4 Tindak lanjut LHP	Dokumen Dokumen Laporan Dokumen	12 12 2 1	12 12 2 1	100.00 100.00	
		Outcome Terwujudnya pengelolaan administrasi keuangan daerah yang baik sesuai ketentuan yang berlaku	persen	100.00	100.00	100.00	
1.11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor	Inputs <i>Biaya</i>	Rp	565,000,000.00	557,709,100.00	98.71	
		Output jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	set	1.00	1.00		
		Outcome Terwujudnya pemeliharaan rutin bangunan gedung kantor untuk kelancaran dan keamanan pelaksanaan tugas dinas	persen	100.00	100.00		

Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Presentasi Pencapaian		Ket
					Realisasi	Tingkat Capaian (Target)	
2	3	4	5	6	7	8	
1.12	pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Inputs <i>Biaya</i>	Rp	843,299,192.00	825,408,770.00	97.88	
		Output Pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas operasional berupa: Kendaraan dinas roda empat kKendaraan dinas roda STNK kendaraan dinas	buah buah buah	13.00 36.00 43.00			
		Outcome Terpeliharanya kendaraan dinas kantor Bappeda prov.sulsel untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dinas sehari-hari	persen	100.00	100.00		
1.13	Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor	Inputs <i>Biaya</i>	Rp	57,500,000.00	229,721,125.00	93.40	
		Output terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor: Pemeliharaan berkala lift	buah	1.00	1.00		
		Outcome Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor, lift CCTV dan pompa air	persen	100.00	100.00		

Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Presentasi Pencapaian		Ket	
					Realisasi	Tingkat Capaian (Target)		
2	3	4	5	6	7	8		
1.14	pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Inputs						
		<i>Biaya</i>	Rp	57,500,000.00	57,050,000.00	99.22		
		Output						
		Terlaksananya perawatan peralatan gedung berupa: Pesawat telepon dan PABX AC sound System	kali kali kali	4.00 4.00 4.00				
		Outcome						
		Termanfaatnya peralatan gedung kantor untuk memperlancar operasional sehari-hari	persen	100.00	100.00			
1.15	pemeliharaan rutin/ berkala Mebeleur	Inputs						
		<i>Biaya</i>	Rp	10,000,000	9,955,000.00	99.55		
		Output						
		Terlaksananya pemeliharaan mebeleur	buah	30.00	30.00			
		Outcome						
		Terpeliharanya mebeleur kantor untuk mendukung kelancaran dan keamanan dalam pelaksanaan tugas dinas sehari-hari	persen	1,000.00	100.00			
1.16	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Inputs						
		<i>Biaya</i>	Rp	114,750,000.00	114,725,000.00	99.98		
		Output						
		Tersediannya pakaian dinas berupa: pakaian sipil lengkap eselon II pakaian sipil resmi eselon II pakaian sipil harian eselon II,III & IV pakaian dinas harian eselon IV dan staf	pasang pasang pasang pasang	1.00 1.00 20.00 132.00	1.00 1.00 20.00 132.00			
		Outcome						
		Termanfaatnya kendaraan dinas operasional kantor Bappeda untuk kelancaran kegiatan	persen	100.00	100.00			
1017	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Inputs						
		<i>Biaya</i>	Rp	2,400,000	2,400,000	100.00		
		Output						
		Tersediannya pakaian kerja lapangan Pol PP Bappeda prov.sulsel	pasang	6.00	6.00			
		Outcome						
		Termanfaatnya pakaian kerja Pol PP Bappeda prov.sulsel dan staf Bappeda Prop. Sulsel	persen	100.00	100.00			

Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Presentasi Pencapaian		Ket	
					Realisasi	Tingkat Capaian (Target)		
2	3	4	5	6	7	8		
1.18	Pendidikan Pelatihan Formal	Inputs Biaya	Rp	165,700,000.00	148,656,393.00	98.71		
		Output Tersedianya kendaraan dinas operasional kantor Bappeda prov.sulsel: Roda empat Roda dua	unit unit	2.00 6.00	2.00 6.00			
		Outcome Termanfaatkannya kendaraan dinas operasional kantor Bappeda untuk kelancaran kegiatan	persen	100.00	100.00			
1.19	Pengadaan pakaian khusus Hari-hari tertentu	Inputs Biaya	Rp	64,000,000.00	63,360,000.00	99.00		
		Output Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu berupa pakaian olahraga	pasang	134.00	134.00			
		Outcome Termanfaatkannya pakaian olahraga bagi pejabat dan staf Bappeda prov.sulsel dan staf Bappeda Prop. Sulsel	persen	100.00	100.00			
1.2	Penyusunan laporan dan pengelolaan Administrasi Perkantoran	Inputs Biaya	Rp	227,800,000.00	214,512,500.00	94.17		
		Output Tersedianya laporan pengelolaan Administrasi perkantoran	Dokumen	1.00	1.00			
		Outcome Termanfaatkannya laporan Administrasi Perkantoran untuk meningkatkan kualitas sistem pelaporan	persen	100.00	100.00			
1.21	Pengelolaan perpustakaan,pengarsipan,Dokumentasi dan informasi	Inputs Biaya	Rp	34,100,000.00	34,082,700.00	99.95		
		Output Tersedianya dokumen pengelolaan Administrasi perkantoran	Dokumen	3.00	3.00			
		Outcome Termanfaatkannya laporan Administrasi Pengelolaan perpustakaan,pengarsipan, dokumentasi dan informasi untuk meningkatkan kualitas sistim pelaporan	persen	100.00	100.00			

Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Presentasi Pencapaian		Ket
					Realisasi	Tingkat Capaian (Target)	
2	3	4	5	6	7	8	
1.22	Penyusunan pengelolaan barang dan jasa Bappeda prov.sulsel	Inputs <i>Biaya</i>	Rp	83,900,000.00	81,836,900.00	97.54	
		Output Tersedianya laporan ketataksanaan Administrasi berupa:Updating data aset,lap. Barang dan jasa RKPBM/TKBMB, DKPBM/TKBMD & Realisasi pengadaan barang dan jasa	Dokumen	3.00	3.00		
		Outcome Termanfaatkannya laporan Administrasi pengelolaan barang dan jasa Bappeda untuk peningkatan kualitas sistim pelaporan	persen	100.00	100.00		
1.23	Pemeliharaan sistem Manajemen Akuntansi dan Keuangan Daerah	Inputs <i>Biaya</i>	Rp	174,900,000.00	174,898,100	100.00	
		Output Terpeliharanya sistem pengelolaan keuangan SIMAKDA dan SIMGAJI	Sistem	2	2		
		Outcome Termanfaatkannya sistem pengelolaan keuangan daerah untuk meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan	persen	100	100		
1.24	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Inputs <i>Biaya</i>	Rp	37,284,000	35,924,000	96.35	
		Output Tersedianya bahan bacaan berupa: surat kabar Kompas surat kabar tribun surat kabar fajar surat kabar sindo surat kabar media indonesia majalah tempodan trubus	bulan bulan bulan bulan bulan bulan	4/12/2015 8/12/2015 10/12/2015 4/12/2015 1/12/2015 2/12/2015	4/12/2015 8/12/2015 10/12/2015 4/12/2015 1/12/2015 2/12/2015	100.00	
		Outcome Termanfaatkannya bahan bacaan/bahan referensi nonbuku bagi pejabat dan staf Bappeda prov.sulsel	persen	100.00	100.00	100.00	

Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Presentasi Pencapaian		Ket
					Realisasi	Tingkat Capaian (Target)	
2	3	4	5	6	7	8	
1.25	Penyusunan dan pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Inputs					
		<i>Biaya</i>	Rp	137,700,000	137,661,000	99.97	
		Output					
	Tersedianya laporan hasil pelaksanaan penataan Administrasi kepegawaian	dokumen	5	5	100.00		
	Outcome						
	Termanfaatkannya hasil penataan Administrasi kepegawaian untuk peningkatan kinerja aparatur Bappeda	persen	100.00	100.00	100.00		
1.26	Pemberian penghargaan Purna tugas	Inputs					
		<i>Biaya</i>	Rp	11,000,000	11,000,000	100.00	
		Output					
	Terlaksananya pemberian penghargaan Purna tugas	orang	3	3	100.00		
	Outcome						
	Termanfaatkannya pemberian penghargaan purna tugas PNS Bappeda Prov.sulsel	persen	100.00	100.00	100.00		
program peningkatan kapasitas dan kinerja SKPD							
2.1	Penyusunan rencana kerja tahunan	Inputs					
		<i>Biaya</i>	Rp	9,500,000	6,010,400	63.27	
		Output					
	Tersedianya informasi rencana kerja Bappeda tahunan	Dok	1	1	100.00		
	Outcome						
	Termanfaatkannya dokumen rencana kerja Bappeda dalam pelaksanaan kegiatan Bappeda	persen	100.00	100.00	100.00		
2.2	Penyusunan DPPA SKPD	Inputs					
		<i>Biaya</i>	Rp	57,625,000	54,213,800	94.08	
		Output					
	Tersedianya informasi rencana kerja Bappeda tahunan	Dok	2	2	100.00		
	Outcome						
	Termanfaatkannya dokumen rencana kerja Bappeda dalam pelaksanaan kegiatan Bappeda	persen	100.00	100.00	100.00		

Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Presentasi Pencapaian		Ket
					Realisasi	Tingkat Capaian (Target)	
2	3	4	5	6	7	8	
2.3	Penyusunan RKA dan DPA SKPD	Inputs Biaya	Rp	109,500,000	78,916,200	72.07	
		Output Tersedianya informasi RKA dan DPA Bappeda prov.sulsel	Dok	2	2	100.00	
		Outcome Termanfaatkannya informasi RKA dan DPA TA 2015 bagi kegiatan SKPD Bappeda prov.sulsel	persen	100.00	100.00	100.00	
2.4	Penyusunan laporan kegiatan SKPD	input biaya	Rp	793,425,000.00	707,636,600.00	89.19	
		output Tersedianya informasi kegiatan SKPD Bappeda prov.sulsel	Dok	4.00	4.00	1	
		Outcome Termanfaatkannya informasi hasil kegiatan SKPD Bappeda prov.sulsel	persen	100.00	100.00		
2.4	Penyusunan pelaporan keuangan Semesteran	input biaya	Rp	45,825,000.00	45,825,000.00	100.00	
		output Dokumen penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Dok	1.00	1.00		
		Outcome Terwujudnya informasi keadaan keuangan per-semesteran untuk mendukung Akuntabilitas pemerintah prov.sulsel	persen	100.00	100.00		
2.5	Penyusunan pelaporan prognoasis realisasi anggaran	input biaya	Rp	45,825,000.00	45,825,000.00	99.67	
		output Laporan prognosis realisasi keuangan	Laporan	1.00	1.00		
		Outcome Terwujudnya informasi keadaan keuangan per-semesteran untuk mendukung Akuntabilitas kinerja Bappeda Prov.sulsel	persen	100.00	100.00		
2.7	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	input biaya	Rp	59,875,000.00	59,875,000.00	99.73	
		output Laporan keuangan tahunan	Laporan	1.00	1.00		
		Outcome Terwujudnya informasi keadaan keuangan akhir tahun untuk mendukung akuntabilitas pemerintah daerah	persen	100.00	100.00		

2	Program dan Kegiatan	3	Indikator Kinerja	4	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Presentasi Pencapaian		Ket
							6	7	
2		3		4		5	6	7	8
2.8	Penyusunan Laporan administrasi keuangan	input							
		biaya		Rp		393,925,000.00	388,222,178.00	98.55	
		output							
		Tersedianya layanan jasa keuangan terdiri dari:							
			_SPJ Bulanan LRA dan laporan operasional	Lap	12.00	12.00			
			_Laporan realisasi SPJ keuangan	Lap	12.00	12.00			
			_Laporan penjabaran pertanggung jawaban keuangan	Lap	12.00	12.00			
			_Laporan realisasi per-obyek belanja	Lap	12.00	12.00			
			_Laporan pajak tahunan PNS Bappeda prov.sulsel	Lap	12.00	12.00			
		Outcome							
			Terwujudnya pengelolaan administrasi keuangan daerah yang baik sesuai ketentuan yang berlaku	persen	100.00	100.00	100.00		
2.9	Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana	Inputs							
		Biaya		Rp		663,350,000.00	601,065,700.00	90.61	
		Output							
			Jumlah dokumen pelaksanaan peningkat	Dokumen	4	4			
		Outcome							
			Termanfaatkannya pelaksanaan peningkatan kemampuan teknis aparat perencana untuk meningkatkan kinerja organisasi	persen	100.00	100.00	100.00		
2.1	Penyusunan analisis kebutuhan pendataan dan pengadaan barang/jasa SKPD	Inputs							
		Biaya		Rp		68,800,000	67,691,300	98.04	
		Output							
			Dokumen analisis kebutuhan pendataan dan pengadaan barang/jasa SKPD untuk peningkatan kinerja Bappeda	Dokumen	2	2	100.00		
		Outcome							
			Termanfaatkannya dokumen analisis kebutuhan pendataan dan pengadaan barang/jasa SKPD untuk peningkatan kinerja Bappeda	persen	100.00	100.00	100.00		
2.11	Peningkatan kinerja aparatur perencana Bappeda Prov.sulsel	Inputs							
		Biaya		Rp		181,300,000	181,279,500	99.99	
		Output							
			Dokumen peningkatan kinerja aparatur perencana Bappeda Prov.sulsel	Dok	2	2	100.00		
		Outcome							
			Termanfaatkannya laporan pelaksanaan peningkatan kinerja aparatur perencana Bappeda prov.sulsel	persen	100.00	100.00	100.00		

Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Presentasi Pencapaian		Ket
					Realisasi	Tingkat Capaian (Target)	
2	3	4	5	6	7	8	
Program peningkatan pengembangan sistem perencanaan dan sistem evaluasi kinerja SKPD							
3.1	Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) Bappeda Prop.Sulsel	Inputs <i>Biaya</i>	Rp	24,000,000	23,719,800	98.83	
		Output Dokumen Akuntabilitas kinerja satuan kerja Bappeda Prov.sulsel	Dok	1	1	100.00	
		Outcome Terukurnya capaian kinerja satuan kerja Bappeda prov.sulsel untuk peningkatan kinerja SKPD	persen	100.00	100.00	100.00	
3.2	Penyusunan Bahan LKPJ Gubernur	Inputs <i>Biaya</i>	Rp	34,000,000.00	33,850,500.00	99.56	
		Output Tersedianya LKPJ Gubernur dan evaluasi kinerja SKPD	lap	1.00	1.00		
		Outcome Termanfaatkannya informasi LKPJ Gubernur untuk peningkatan kinerja	persen	100.00	100.00		
3.3	Pengukuran kinerja pembangunan Prov.sulsel	Inputs <i>Biaya</i>	Rp	116,516,450.00	115,024,900.00	98.72	
		Output Dokumen pengukuran kinerja pembangunan	Dokumen	1.00	1.00		
		Outcome Termanfaatkannya pengukuran kinerja pembangunan Prov.sulsel	persen	100.00	100.00		
4	Program pengembangan Data dan Informasi						
4.1	Penyusunan data dan informasi Bappeda Prov.sulsel	Inputs <i>Biaya</i>	Rp	699,845,000.00	630,734,100.00	90.12	
		Output Dokumen Akuntabilitas kinerja satuan kerja Bappeda Prov.sulsel	dok	2.00	2.00		
		Outcome Terukurnya capaian kinerja satuan kerja Bappeda prov.sulsel untuk peningkatan Biaya					
		Output Pemangku kepentingan yang memanfaatkan data dan informasi spasial berfungsinya Web Server selama hari kerja	Drang/institus	5.00	5.00		
		Outcome Termanfaatkannya data dan informasi spasial untuk pengembangan data dan informasi yang handal	persen	100.00	100.00		
4.2	Pengelolaan data dan Informasi spasial Pembangunan	Inputs					

Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Presentasi Pencapaian		Ket
					Realisasi	Tingkat Capaian (Target)	
2		3	4	5	6	7	8
		<i>Biaya</i>	Rp	223,017,000.00	219,693,900.00	98.51	
		Output Tersedianya data dan analisis bidang SDM dan pengembangan kelembagaan	Dokumen	1.00	1.00		
		Outcome Termanfaatkannya data/informasi sosial budaya dalam pembangunan SDM dan pengembangan kelembagaan	persen	100.00	100.00		
4.3	Penyusunan pengumpulan dan analisis Data Informasi kebutuhan Perencanaan Sosial Budaya dan pengembangan Kelembagaan	Inputs <i>Biaya</i>	Rp	137,357,407.00	111,544,500.00	81.21	
		Output Jumlah peta tematik	Peta	1.00	1.00		
		Outcome Termanfaatkannya peta tematik untuk peningkatan kualitas perencanaan Bidang SDA	persen	100.00	100.00		
4.4	Pembangunan data dan informasi spasial pembangunan sulawesi selatan	Inputs <i>Biaya</i>	Rp	440,000,000.00	424,940,100.00	96.58	
		Output Jumlah peta tematik	peta	1.00	1.00		
		Outcome Termanfaatkannya peta tematik untuk peningkatan kualitas perencanaan bidang SDA	persen	100.00	100.00		
4.5	Publikasi data dan informasi pembangunan daerah	Inputs 4.Analisis IPM sulawesi selatan 5.Indikator pembangunan ekonomi sulsel 6.Indikator pembangunan sosial sulsel 7.Kajian singkat dana dekosentrasitahun 2013 di sulsel 8.Kajian peran tenaga kerja dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah Prov.sulsel 9.Analisis pengaruh pemberdayaan SDM terhadap Good Governance dan pembangunan daerah di sulsel	paket	835,621,800.00	822,739,650.00	98.46	
		Outcome Termanfaatkannya data dan informasi pembangunan sulsel sebagai bahan untuk penyusunan perencanaan	persen	100.00	100.00		

Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Presentasi Pencapaian		Ket
					Realisasi	Tingkat Capaian (Target)	
2	3	4	5	6	7	8	
4.6	Pengumpulan, Updating dan analisis serta informasi pencapaian target Kiunerja Program dan kegiatan	Inputs <i>Biaya</i>	Rp	530,000,000	515,435,950	97.25	
		Output Dokumen informasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan	Dok	1	1	100.00	
		Outcome Termanfaatkannya informasi pembangunan daerah untuk penbingkatan kualitas data dan informasi	persen	100.00	100.00	100.00	
4.7	Pameran pembangunan daerah	Inputs <i>Biaya</i>	Rp	230,322,500	230,222,500	99.96	
		Output Dokumen pelaksanaan pameran pembangunan sulawesi selatan2014	Dokumen	1	1	100.00	
		Outcome Tersosialisasikannya data dan informasi hasil-hasil pembangunan	persen	100.00	100.00	100.00	
5) Program Perencanaan Pembangunan Daerah							
5.1	Workshop Hasil-hasil kajian Bappeda tahun anggaran 2014	Inputs <i>Biaya</i>	Rp	70,425,000	70,387,400	99.95	
		Output Dokumen Resume hasil kajian perencanaan pembangunan	Dokumen	5	5	100.00	
		Outcome Termanfaatkannya dokumen pelaksanaan Workshop hasil-hasil kajian Bappeda	persen	100.00	100.00	100.00	
5.2	Sinkronisasi dan Sinergitas kegiatan perencanaan pembangunan daerah Prop.Sulsel	Inputs <i>Biaya</i>	Rp	1,191,650,000.00	1,187,387,090.00	99.64	
		Output Tersusunnya Lap. Singkronisasi & Sinergitas perencanaan pembangunan daerah	Dokumen	1.00	1.00		
		Outcome Termanfaatkannya Lap.Singkronisasi & Sinergitas untuk peningkatan kualitas perencanaan pembangunan Prov.sulsel	persen	100.00	100.00		

Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Presentasi Pencapaian		Ket
					Realisasi	Tingkat Capaian (Target)	
2	3	4	5	6	7	8	
5.3	Koordinasi perencanaan program/kebijakan pembangunan sulsel	Inputs					
		<i>Biaya</i>	Rp	281,200,000.00	280,463,100.00	99.74	
		Output					
		Dokumen pelaksanaan koordinasi perencanaan program/kegiatan pembangunan sulsel	Dok	1.00	1.00		
		Outcome					
		Termanfaatkannya dokumen untuk penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Prov.sulsel	persen	100.00	100.00		
5.4	Penyusunan dan analisis sektor dalam PDRB Sulawesi selatan	Inputs					
		<i>Biaya</i>	Rp	62,100,000.00	61,431,800.00	98.92	
		Output					
		Dokumen hasil penyusunan dan analisis sektor dalam PDRB sulsel	Dokumen	1.00	1.00		
		Outcome					
		Termanfaatkannya dokumen penyusunan dan analisis sektor dalam PDRB Sulsel	persen	100.00	100.00		
5.5	Pengembangan kerjasama pembangunan terkait pengembangan SDA dan Prasarana Wilayah	Inputs					
		<i>Biaya</i>	Rp	354,742,000.00	352,068,600.00	99.25	
		Output					
		Dokumen pelaksanaan kerjasama pembangunan bidang SDA dan Praswil	Dok	3.00	3.00		
		Outcome					
		Termanfaatkannya kerjasama pembangunan bidang SDA dan Praswil	persen	1,000.00	100.00		

2	Program dan Kegiatan	3	Indikator Kinerja	4	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Presentasi Pencapaian		Ket
							6	7	
2		3		4		5	6	7	8
5.6	Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan jaringan Irigasi melalui WISMP	Inputs							
		<i>Biaya</i>	Rp	632,700,000.00	614,246,850.00	97.08			
		Output							
			Dokumen pelaksanaan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan jaringan irigasi melalui WISMP	Dokumen	3.00	3.00			
			Outcome						
			Termanfaatkannya laporan koordinasi WISMP untuk peningkatan kualitas perencanaan pembangunan bidang SDA dan Praswil	persen	100.00	100.00			
5.7	Koordinasi perencanaan pengembangan kawasan Prioritas, cepat tumbuh dan andalan	Inputs							
		<i>Biaya</i>	Rp	784,625,000.00	783,320,725.00	99.87			
		Output							
			Dokumen pelaksanaan koordinasi perencanaan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan	Dok	4.00	4.00			
			Outcome						
			Termanfaatkannya kebijakan pengembangan kawasan untuk peningkatan kualitas perencanaan SDA	persen	100.00	100.00			
5.8	Koordinasi perencanaan pengembangan perumahan dan pemukiman	Inputs							
		<i>Biaya</i>	Rp	416,693,250.00	415,655,700.00	99.75			
		Output							
			Dokumen pelaksanaan koordinasi perencanaan pengembangan perumahan dan pemukiman	Dokumen Laporan	6.00 1.00	6.00 1.00			
			Outcome						
			Termanfaatkannya dokumen koordinasi perencanaan pengembangan perumahan dan pemukiman untuk peningkatan kualitas perencanaan bidang SDA	persen	100.00	100.00			
5.9	Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Infrastruktur wilayah	Inputs							
		<i>Biaya</i>	Rp	576,459,901.00	576,459,901.00	99.97			
		Output							
			Dokumen pelaksanaan perencanaan pembangunan Infrastruktur wilayah	Dok	3.00	3.00			
			Outcome						
			Termanfaatkannya laporan koordinasi untuk peningkatan kualitas perencanaan pembangunan bidang SDA dan Prawil	persen	100.00	100.00			

Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Presentasi Pencapaian		Ket
					Realisasi	Tingkat Capaian (Target)	
2	3	4	5	6	7	8	
5.1	Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan lingkungan Hidup SDA	Inputs <i>Biaya</i>	Rp	547,684,550.00	542,316,900.00	99.02	
		Output Dokumen pelaksanaan koordinasi pengelolaan lingkungan hidup dan SDA	Dok	1.00	1.00		
		Outcome Termanfaatkannya koordinasi perencanaan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup untuk peningkatan kualitas perencanaan bidang SDA dan Praswil	persen	100.00	100.00		
5.11	Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pengembangan kawasan sehat	Inputs <i>Biaya</i>	Rp	181,558,200.00	181,231,250.00	99.82	
		Output Dokumen pelaksanaan koordinasi perencanaan kawasan sehat	Dok	1.00	1.00		
		Outcome Termanfaatkannya koordinasi perencanaan kawasan sehat untuk peningkatan kualitas perencanaan bidang SDA dan Praswil	persen	100.00	100.00		
5.12	Fasilitas kerjasama dengan swasta lembaga terkait pengembangan SDA dan Prasarana Wilayah	Inputs <i>Biaya</i>	Rp	437,881,500.00	437,746,013.00	99.97	
		Output Tersusunnya laporan pelaksanaan kerjasama dengan swasta dan lembaga terkait pengembangan SDA dan Praswil	Dok	1.00	1.00		
		Outcome Termanfaatkannya laporan pelaksanaan kerjasama dengan swasta dan lembaga terkait untuk peningkatan kualitas perencanaan pembangunan	persen	100.00	100.00		
5.13	Pengembangan program kerjasama bidang Sosbud dan pengembangan kelembagaan	Inputs <i>Biaya</i>	Rp	915,452,737.00	898,861,300.00	98.19	
		Output Dokumen pelaksanaan kerjasama pembangunan bidang SDM dan pengembangan kelembagaan	Dokumen	6.00	6.00		
		Outcome Termanfaatkannya rekomendasi program kerjasama bidang sosial budaya untuk peningkatan kualitas perencanaan bidang-bidang SDA dan pengembangan kelembagaan	persen	100.00	100.00		

Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Presentasi Pencapaian		Ket
					Realisasi	Tingkat Capaian (Target)	
2	3	4	5	6	7	8	
5.14	Koordinasi kebijakan/program Prioritas pembangunan pendidikan, pemuda dan olahraga	Inputs <i>Biaya</i>	Rp	221,185,000.00	197,208,300.00	89.16	
		Output Dokumen koordinasi kebijakan pembangunan pendidikan, pemuda dan olahraga	Dokumen	2.00	2.00		
		Outcome Termanfaatkannya dokumen pelaksanaan program prioritas pembangunan pendidikan, pemuda dan olahraga	persen	100.00	100.00		
5.15	Koordinasi kebijakan/program prioritas pembangunan kesehatan dan kesejahteraan sosial	Inputs <i>Biaya</i>	Rp	398,800,000.00	382,557,700.00	95.93	
		Output Dokumen pelaksanaan program strategis pembangunan kesehatan dan kesejahteraan sosial di sulse	Dokumen	5.00	5.00		
		Outcome Termanfaatkannya dokumen pelaksanaan program prioritas pembangunan kesehatan dan kesejahteraan sosial	persen	100.00	100.00		
5.16	Koordinasi kebijakan/program prioritas pembangunan kelembagaan pemerintah dan Masyarakat	Inputs <i>Biaya</i>	Rp	737,445,000.00	727,755,523.00	98.69	
		Output Dokumen pelaksanaan koordinasi program strategis pembangunan kelembagaan pemerintah dan masyarakat	Dokumen	2.00	2.00		
		Outcome Termanfaatkannya bahan informasi dalam peningkatan pelaksanaan program prioritas pembangunan kelembagaan pemerintah dan masyarakat	persen	100.00	100.00		
5.17	Koordinasi kebijakan/program prioritas pembangunan kependudukan dan ketenagakerjaan	Inputs <i>Biaya</i>	Rp	265,722,500.00	250,538,500.00	94.29	
		Output Tersedianya informasi pelaksanaan program strategis pembangunan kependudukan dan ketenagakerjaan di sulse	Dokumen	2.00	2.00		
		Outcome Termanfaatkannya bahan informasi dalam peningkatan pelaksanaan program prioritas pembangunan kependudukan dan ketenagakerjaan	persen	100.00	100.00		

Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Presentasi Pencapaian		Ket
					Realisasi	Tingkat Capaian (Target)	
2	3	4	5	6	7	8	
5.18	Koordinasi program Indeks Dekrasi indonesia (IDI)	Inputs <i>Biaya</i>	Rp	149,580,000.00	127,571,400.00	85.29	
		Output Dokumen pelaksanaan koordinasi program Indeks demokrasi indonesia (IDI) di provinsi sulsel	Dok	1.00	1.00		
		Outcome Termanfaatkannya dokumen koordinasi program Indeks demokrasi indonesia (IDI) di provinsi sulsel	persen	100.00	100.00		
5.19	Koordinasi percepatan pencapaian tujuan pembangunan Milenium (MDGs)	Inputs <i>Biaya</i>	Rp	268,524,843.00	262,752,329.00	97.85	
		Output Dokumen pelaksanaan koordinasi percepatan pencapaian MDGs di sulsel	Dokumen	1.00	1.00		
		Outcome Termanfaatkannya koordinasi percepatan pencapaian tujuan pembangunan milenium (MDGs) prov.sulsel	persen	100.00	100.00		
5.2	Updating rencana aksi daerah pemberantasan korupsi prov.sulsel	Inputs <i>Biaya</i>	Rp	124,750,000.00	111,822,350.00	89.64	
		Output Dokumen pelaksanaan updating RAD pemberantasan korupsi di sulsel tahun 2014	Dokumen	1.00	1.00		
		Outcome Termanfaatkannya dokumen RAD pemberantasan korupsi	persen	100.00	100.00		
5.21	Updating rencana aksi daerah pangan dan gizi (RAD-PG)	Inputs <i>Biaya</i>	Rp	194,000,000.00	191,898,600.00	89.64	
		Output Dokumen updating RAD pangan dan gizi	Dokumen	1.00	1.00		
		Outcome Termanfaatkannya dokumen untuk peningkatan kualitas perencanaan bidang SDM dan pengembangan kelembagaan	persen	100.00	100.00		

Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Presentasi Pencapaian		Ket
					Realisasi	Tingkat Capaian (Target)	
2	3	4	5	6	7	8	
5.22	Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah bidang ekonomi	Inputs <i>Biaya</i> Output _Tersedianya laporan koordinasi kerjasama pembangunan bidang ekonomi _Tersedianya laporan perencanaan strategi perencanaan ekonomi lokal kab.Barru _Tersedianya laporan kajian rancangan, strategi dan agenda pengembangan ekonomi lokal di sulsel _Tersedianya laporan kajian identifikasi potensi pengembangan ekonomi masyarakat perikanan di sulsel _Tersedianya laporan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah sulsel _Tersedianya laporan analisis fator-faktor yang mempengaruhi kinerja pelayanan pariwisata di sulsel _Tersedianya laporan analisis komposisi demokrasi kependudukan dalam pengembangan ekonomi wilayah daerah Outcome Termanfaatkannya dokumen koordinasi kerjasama	Rp Dok Dok Dok Dok Dok Dok Dok Dok persen	335,817,737.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00	333,270,200.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00	99.24 	
5.23	Koordinasi pengembangan UKM dan Wirausaha di sulsel	Inputs <i>Biaya</i> Output _Tersedianya laporan koordinasi pengembangan UKM dan Wirausaha _Tersedianya laporan penyusunan strategi program pemberdayaan ekonomi berbasis lembaga keuangan mikro di sulsel _Tersedianya laporan studi terhadap penyediaan infrastruktur dan jaringan pendukung bagi pengembangan UMKM di sulsel _Tersedianya laporan pengaruh faktor-faktoreksternal dan internal terhadap kinerja usaha mikro dan keci (UMK) DI SULSEL _Tersedianya laporan kajian faktor-factoryang menentukan pertumbuhan usaha kecil serta strategi pengembangan di sulsel Outcome	Rp Dokumen	141,975,000.00 6.00	136,265,950.00	95.98	

Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Presentasi Pencapaian		Ket
					Realisasi	Tingkat Capaian (Target)	
2	3	4	5	6	7	8	
5.24	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Inputs <i>Biaya</i>	Rp	949,750,000.00	936,852,700.00	98.64	
		Output _Tersedianya laporan koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi _Tersedianya laporan kajian sektor pertanian dan perkebunan dalam rangka pengembangan ekonomidaerah prov.sulsel _Tersedianya laporan studi terhadap dimensi pembangunan ekonomi dan kegiatan investasi di sulsel _Tersedianya laporan analisis sektor pariwisata dalam pengembangan ekonomi wilayah sulsel _Tersedianya laporan kajian pasar tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi di sulsel _Tersedianya laporan kajian optimalisasi pendapatan daerah dalam rangka pembiayaan pembangunan di sulsel _Tersedianya laporan strategi optimalisasi pendapatan daerah dalam rangka pembiayaan pembangunan di sulsel	Dok Dok Dok Dok Dok Dok Dok	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00		
		Outcome					
5.25	Koordinasi perencanaan industri di sulsel						

Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Presentasi Pencapaian		Ket
					Realisasi	Tingkat Capaian (Target)	
2		3	4	5	6	7	8
		Inputs <i>Biaya</i>	Rp	654,550,000.00	647,543,550.00	98.93	
		Output _Tersedianya laporan koordinasi perencanaan industri _Tersedianya laporan kajian Dampak sosial ekonomi perubahan teknologi mesin panen padi di sulsel _Tersedianya laporan kajian efektifitas pengontrolan Comdev industri yang berwawasan lingkungan regulasi pemprov sulsel _Tersedianya laporan penyusunan blue print pengembangan industri komoditi andalan sulawesi selatan _Tersedianya laporan penyusunan studi kelayakan pendahuluan investasi pengolahan limbah pabrik CPO sulsel _Tersedianya laporan penyusunan studi kelayakan pendahuluan investasi proyek agro industri kelapa di kab.Wajo _Tersedianya laporan hasil kajian pemetaan sisi permintaan sektor industri pengelolaan ikan di sulsel	Dok Dok Dok Dok Dok Dok Dok	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00		
		Outcome					
5.26	Koordinasi perencanaan ketahanan pangan daerah	Inputs <i>Biaya</i>	Rp	476,275,000.00	467,714,150.00	98.20	
		Output _Tersedianya laporan koordinasi perencanaan ketahanan pangan daerah _Tersedianya laporan analisis kebijakan implementasi,revitalisasi pertanian _Tersedianya laporan pengelolaan lahan pertanian ramah lingkungan di sulawesi selatan _Tersedianya laporan kajian kelayakanpengembangan usaha Agribisnis terpadu di wilayah pinggiran danau sidenrang _Tersedianya laporan alternatif pola pengembangan usaha penggemukan sapi potong di sulsel menunjang Swasembada sapi nasional _Tersedianya laporan kajian kelayakan pengembangan usaha Agribisnis terpadu di kabupaten Takalar	Dok Dok Dok Dok Dok Dok	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00		
		Outcome Termanfaatkannya dokumen koordinasi perencanaan ketahanan pangan daerahuntuk peningkatan kualitas	persen	100.00	100.00		

Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Presentasi Pencapaian		Ket
					Realisasi	Tingkat Capaian (Target)	
2	3	4	5	6	7	8	
5.27	Koordinasi pengembangan pemasaran produksi unggulan daerah	Inputs <i>Biaya</i> Output _Tersedianya laporan koordinasi pengembangan pemasaran produksi unggulan daerah _Tersedianya laporan penguatan strategi pengembangan kawasan agro politan berbasis peningkatan daya saing produk agribisnis unggulan di sulse _Tersedianya laporan kajian sistem transformasi penyuluhan dalam mempercepat adopsi teknologi pertanian _Tersedianya laporan kajian sistem perencanaan dan pengawasan pupuk bersubsidi _Tersedianya laporan studi terhadap program peningkatan keunggulan kompetitif komoditas unggulan utama di bidang sektor perikanan dan kelautan prov.sulse _Tersedianya laporan kajian kelayakan pengembangan kopi sebagai komoditas unggulan Outcome	Rp	461,700,000.00	456,782,000.00	98.93	
5.28	Koordinasi perencanaan pengentasan kemiskinan di sulse	Inputs <i>Biaya</i> Output _Tersedianya dokumen koordinasi perencanaan pengentasan kemiskinan _Tersedianya laporan strategi penanggulangan kemiskinan berbasis Good Governance dan Good Education di sulse _Tersedianya laporan penyusunan strategi penyediaan lapangan kerja sebagai upaya mengurangi tingkat kemiskinan di sulse _Tersedianya laporan kajian BL, terhadap pemberdayaan masyarakat (Cluster II) dalam penanggulangan laju kemiskinan _Tersedianya dokumen penyusunan LP2KD dan LKPD _Sosialisasi program penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan ekonomi berbasis kerakyatan Outcome Termanfaatkannya laporan koordinasi perencanaan pengentasan kemiskinan untuk peningkatan kualitas perencanaan bidang ekonomi	Rp	715,495,000.00	705,906,900.00	98.66	
5.29	Perencanaan pengembangan kawasan Ekonomi Khusus	Inputs <i>Biaya</i> Output Tersedianya laporan koordinasi pelaksanaan MP3EI Outcome Termanfaatkannya laporan koordinasi pelaksanaan MP3EI	Rp	372,080,000.00	366,877,300.00	98.60	

Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Presentasi Pencapaian		Ket
					Realisasi	Tingkat Capaian (Target)	
2	3	4	5	6	7	8	
5.3	Koordinasi penetapan kinerja (PK) SKPD pemerintah prov.sulsel 2015	Inputs <i>Biaya</i>	Rp	103,500,000.00	103,465,000.00	99.97	
		Output Dokumen koordinasi penetapan kinerja (PK) SKPD pemerintah prov.sulsel 2014	Dokumen	1.00	1.00		
		Outcome Termanfaatkannya dokumen koordinasi penetapan kinerja (PK) SKPD pemerintah prov.sulsel untuk peningkatan kualitas perencanaan pembangunan	persen	100.00	100.00		
5.31	Penyusunan Roadmap Repormasi Birokrasi bidang penguatan Akuntabilitas inerja	Inputs <i>Biaya</i>	Rp	191,000,000.00	184,744,100.00	96.72	
		Output Dokumen hasil laporan Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sulsel tahun 2013	Dokumen	1.00	1.00		
		Outcome Termanfaatkannya dokumen untuk peningkatan kualitas perencanaan pembangunan	persen	100.00	100.00		

Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Presentasi Pencapaian		Ket
					Realisasi	Tingkat Capaian (Target)	
2	3	4	5	6	7	8	
5.32	Koordinasi penyusunan laporan dana alokasi khusus NON DRTahun 2015	Inputs <i>Biaya</i>	Rp	130,020,000.00	125,047,150.00	96.18	
		Output Dokumen pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan dana alokasi khusus (DAK) Non DR TA 2014	Dok	1.00	1.00		
		Outcome Termanfaatkannya laporan dana alokasi khusus (DAK) Non DR TA 2014 untuk peningkatan kualitas kinerja pembangunan	persen	100.00	100.00		
5.33	Penyusunan dan sosialisasi daftar alokasi kegiatan pembangunan APBN dan APBD Prop.Sulsel	Inputs <i>Biaya</i>	Rp	112.900,000	89,938,253.00	79.66	
		Output Dokumen penyusunan dan sosialisasi DAK pembangunan APBN dan APBD prov.sulsel	Dokumen	24.00	24.00		
		Outcome Termanfaatkannya dokumen DAK untuk peningkatan kualitas kinerja perencanaan pembangunan	persen	100.00	100.00		
5.34	Evaluasi RKPD Prov.Sulsel	Inputs <i>Biaya</i>	Rp	290,150,900.00	248,405,784.00	98.02	
		Output Dokumen pelaksanaan koordinasi pelaporan inpres no.3 tahun 2010	Dok	1.00	1.00		
		Outcome Termanfaatkannya dokumen pelaksanaan koordinasi pelaporan inpres no.3 tahun peningkatan kualitas kinerja perencanaan pembangunan	persen	100.00	100.00		
5.36	Penyusunan usulan pendanaan dan konsultasi program kegiatan dekonsentrasi tugas bantuan	Inputs <i>Biaya</i>	Rp	285.000,000	284,919,704.00	99.90	
		Output Tersusunnya daftar usulan program/kegiatan APBN Provinsi Sulawesi selatan tahun 2015 pra dan pasca musrenbang nasional	Dokumen	1.00	1.00		
		Outcome Termanfaatkannya usulan pendanaan sebagai bahan kebijakan pembangunan tahun 2015	persen	100.00	100.00		

Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Presentasi Pencapaian		Ket
					Realisasi	Tingkat Capaian (Target)	
2	3	4	5	6	7	8	
5.37	Fasilitas kerjasama pembangunan Regional	Inputs <i>Biaya</i>	Rp	474,135,000.00	468,113,400.00	98.73	
		Output Dokumen pelaksanaan fasilitas kerjasama pembangunan Regional	Dokumen	2.00	2.00		
		Outcome Termanfaatkannya kerjasama pembangunan Regional untuk peningkatan kualitas perencanaan pembangunan	persen	100.00	100.00		
5.38	Penyusunan rancangan RKPD	Inputs <i>Biaya</i>	Rp	125,000,000.00	105,542,800.00	84.42	
		Output Tersusunnya rancangan RKPD tahun 2015	Dokumen	1.00	1.00		
		Outcome Termanfaatkannya rancangan RKPD Tahun 2015 sebagai bahan musrenbang RKPD	persen	100.00	100.00		
5.39	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Inputs <i>Biaya</i>	Rp	521,190,350.00	468,985,443.00	89.98	
		Output Dokumen terlaksananya musrenbang RKPD Tahun 2014	Dok	1.00	1.00		
		Outcome Termanfaatkannya hasil pelaksanaan musrenbang untuk peningkatan kualitas perencanaan pembangunan	persen	100.00	100.00		
5.4	Penetapan RKPD	Inputs <i>Biaya</i>	Rp	179,250,000.00	173,515,780.00	96.80	
		Output Tersedianya dokumen rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2015	Dokumen	1.00	1.00		
		Outcome Termanfaatkannya dokumen RKPD Prov.sulsel tahun 2015	persen	100.00	100.00		

Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Presentasi Pencapaian		Ket
					Realisasi	Tingkat Capaian (Target)	
2	3	4	5	6	7	8	
5.41	Penyusunan KUA dan PPAS APBD Pokok	Inputs <i>Biaya</i>	Rp	317,308,400.00	315,911,100.00	99.56	
		Output Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS APBD tahun 2015	Dokumen	2.00	2.00		
		Outcome Termanfaatkannya dokumen KUA dan PPAS APBD sebagai bahan penyusunan RAPBD Pokok tahun 2015	persen	100.00	100.00		
5.42	Analisis kebijakan perencanaan keuangan daerah	Inputs <i>Biaya</i>	Rp	518,700,000.00	507,831,250.00	97.90	
		Output Dokumen analisis kebijakan perencanaan keuangan daerah	Dokumen	4.00	4.00		
		Outcome Termanfaatkannya kegiatan sebagai bahan referensi pembangunan daerah	persen	100.00	100.00		
5.43	Analisis kebijakan perencanaan kebijakan pembangunan daerah	Inputs <i>Biaya</i>	Rp	786,844,000.00	774,653,750.00	98.45	
		Output Dokumen pelaksanaan analisis data dan acuan dalam perencanaan pembangunan daerah	Dokumen	8.00	8.00		
		Outcome Termanfaatkannya kegiatan untuk peningkatan kualitas perencanaan pembangunan	persen	100.00	100.00		
5.44	Asistensi usulan penganggaran pembangunan	Inputs <i>Biaya</i>	Rp	76,700,000.00	75,386,800.00	98.29	
		Output Dokumen pelaksanaan asistensi usulan penganggaran pembangunan	Dokumen	1.00	1.00		
		Outcome Termanfaatkannya dokumen usulan penganggaran pembangunan untuk penyusunan RKA SKPD	persen	100.00	100.00		

Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Presentasi Pencapaian		Ket
					Realisasi	Tingkat Capaian (Target)	
2	3	4	5	6	7	8	
5.45	Sinergitas perencanaan penganggaran dan kebijakan pembangunan	Inputs					
		<i>Biaya</i>	Rp	803,565,000.00	787,113,125.00	97.95	
		Output					
		Dokumen pelaksanaan koordinasi penganggaran dan asistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah	Dok	1.00	1.00		
		Outcome					
		Termanfaatkannya hasil koordinasi penganggaran dan asistensi penyusunan kebijakan pembangunan daerah	persen	100.00	100.00		
5.46	Penyelenggaraan Rakor provinsi	Inputs					
		<i>Biaya</i>	Rp	66,350,000.00	65,971,000.00	99.43	
		Output					
		Dokumen pelaksanaan penyelenggaraan rapat koordinasi pembangunan tingkat provinsi	Dokumen	1.00	1.00		
		Outcome					

Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Presentasi Pencapaian		Ket
					Realisasi	Tingkat Capaian (Target)	
2	3	4	5	6	7	8	
5.47	Penyusunan KUA dan PPAS APBD perubahan	Termanfaatkannya hasil Rakor pembangunan provinsi tahun 2014	persen	100.00	100.00		
		Inputs					
		<i>Biaya</i>	Rp	263,550,000	263,400,403	99.94	
		Output					
		Dokumen dan kebijakan penyusunan penganggaran pembangunan	Dokumen	2	2	100.00	
		Outcome					
		Termanfaatkannya KUA dan PPAS untuk peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	persen	100.00	100.00	100.00	
		Outcome					
		Termanfaatkannya KUA dan PPAS untuk peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	persen	100.00	100.00	100.00	
5.47	Penyusunan perubahan RKPD	Inputs					
		<i>Biaya</i>	Rp	169,525,000	132,342,100	78.07	
		Output					
		Tersedianya dokumen perubahan RKPD 2014	Dok	1	1	100.00	
		Outcome					
		Termanfaatkannya dokumen RKPD perubahan sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS perubahan 2014	persen	100.00	100.00	100.00	
5.48	Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah	Inputs					
		<i>Biaya</i>	Rp	454,405,455	357,512,600	78.68	
		Output					
		Tersosialisasinya kebijakan perencanaan pembangunan daerah	Dok	1	1	100.00	
		Outcome					
		Terlaksananya Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah	persen	100.00	100.00	100.00	
6 6.1	Program pengendalian dan Evaluasi kebijakan pembangunan Daerah Evaluasi RP JMD Provinsi sulsel	Inputs					
		<i>Biaya</i>	Rp	140,382,400	132,614,200	94.47	
		Output					
		Tersedianya informasi capaian kinerja satuan Kerja Bappeda	Dokumen	4	4	100.00	
		Outcome					
		Termanfaatkannya hasil evaluasi RP JMD untuk peningkatan upaya pengendalian pembangunan daerah	persen	100.00	100.00	100.00	

Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Presentasi Pencapaian		Ket
					Realisasi	Tingkat Capaian (Target)	
2	3	4	5	6	7	8	
6.2	Monitoring evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Inputs <i>Biaya</i>	Rp	783,872,321	728,404,654	91.75	
		Output Dokumen pelaksanaan monitoring kegiatan pembangunan APBN dan APBD Prov sulsel	Dok	3	3	100.00	
		Outcome Termanfaatkannya laporan monitoring dan pelaporan untuk peningkatan upaya pengendalian pembangunan	persen	100.00	100.00	100.00	
6.3	Evaluasi kinerja program/kebijakan provinsi sulawesi selatan	Inputs <i>Biaya</i>	Rp	146,250,000	140,678,500	96.19	
		Output Dokumen pelaksanaan evaluasi kinerja program/kegiatan prov.sulsel untuk tahun 2013	Dokumen	1	1	100.00	
		Outcome Termanfaatkannya hasil evaluasi kinerja untuk peningkatan upaya evaluasi dan pengendalian pembangunan	persen	100.00	100.00	100.00	
6.4	Sinkronisasi program-program pembangunan	Inputs <i>Biaya</i>	Rp	188,405,000.00	163,064,000	86.55	
		Output Dokumen pelaksanaan sinkronisasi program-program pembangunan	Dokumen	5	5		
		Outcome Termanfaatkannya sinkronisasi program-program pembangunan untuk peningkatan upaya pengendalian pembangunan	persen	100	100		

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Presentasi Pencapaian		Ket
				Realisasi	Tingkat Capaian (Target)	
2	3	4	5	6	7	8
6.5 Perubahan Dikumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Inputs Biaya	Rp	745,400,000	726,371,785	97.45	
	Output Tersusunnya naskah ravier RP JMD dan RPJPD Prov.sulsel	Dokumen	2	2		
	Outcome Termanfaatkannya review RPJMD dan RPJPD Prov.sulsel	persen	100	100		
6.6 Revisi Renstra Bappeda Prov.sulsel Tahun 2013 - 2018	Input Biaya :	Rp	8,596,200.00		46.36	
	Output Tersusunnya Naskah Renstra Bappeda Prov.Sulsel tahun 2013-2018	Dok	1	1		
	Outcome Termanfaatkannya Revisi Renstra Bappeda	Persen	100	100		

**PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatkan Kualitas Aparatur , Kapasitas Kelembagaan Perencana Bappeda Provensi Sulawesi Selatan		
	Meningkatnya Kualitas Aparatur Perencana	Presentase disiplin Pegawai Bappeda	100%
		Jumlah Pegawai Bappeda yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Perencana	100%
		Jumlah pejabat Fungsional Perencanaan yang mengikuti Diklat Bappeda	25 orang
	Meningkatnya Kualitas Perencana Pembangunan	Presentase ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan	100%
	Meningkatnya Sarana dan prasana	Presentase Efektifitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	
		Presentase Sarana dan Prasarana	100%
2	Terciptanya Kinerja Pelaksana Pembangunan Pemerintah Provinsi dan wlaya		
	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Bappeda Provensi Sulawesi selatan	Jumlah Dokumen/Laporan Informasi Dat dan Laporan penyelenggaraan Pemerintah	11 dokumen dan 1 laporan
		Jumlah Dokumen/ Laporan Perencanaan Tahunan Pembangunan Daerah	119 Dokumen dan 3 Laporan
		Presentase Efektifitas Perencana Pembangunan Ekonomi	100%
		Peresentase Efektifitas Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	100%
		Presentase Efektifitas Perencanaan Pembangunan Prasarana wlaya dan Air	100%
		Presentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencana	100%
	Meningkatnya Kerjasama Antar Sektor dan Antar Wilaya	Presentase Kerjasama Pembangunan daerah	100%

1 Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan 26 Kegiatan

Rp. 4.885.619.531,-

2 Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD dengan 12 Kegiatan

Rp. 2.080.625.000,-

3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sisten Evaluasi

Rp. 176.516.450,-

4 Program Peningkatan Data/ Informasi dengan 7 kegiatan

Rp. 3.192.383.707,-

5 Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan 49 kegiatan

Rp. 16.516.291.323,-

6 Program Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan Daerah 6 kegiatan

Rp. 2.044.157.821,-

Total Rp.28.895.593.832 (Dua puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Sembilan puluh Lima juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah)

Makassar 2015

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

DR.H.SYHRUL YASIN LIMPO, SH. M. Si. MH.

Drs.H.ANDI YAKSAN HAMZAH.MS.

Pangkat Pembina Utama Madya
NIP.19550826 197911 1 002